

BAB II

SEJARAH DAN DINAMIKA PERTAHANAN DAN MILITER

JEPANG

Berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Dingin membawa berbagai perubahan dalam pola hubungan antar bangsa. Seperti yang terjadi di kawasan Asia Pasifik, berakhirnya Perang Dunia II melahirkan negara-negara merdeka baru serta jatuhnya negara imperialis Jepang di kawasan Asia Pasifik, serta Perang Dingin yang diikuti kevakuman power akibat berkurangnya konsentrasi dua super power dunia, Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Hal ini memicu kekhawatiran negara-negara di kawasan akan arah kepastian politik luar negeri. Yang terjadi kemudian adalah negara-negara di kawasan tersebut mulai menyusun kebijakannya demi mencapai kepentingan nasionalnya, antara lain dengan jalan mengembangkan kemampuan pertahanan keamanannya.

Paska kekalahannya dalam Perang Dunia II, Jepang menganut faham pasifisme yang dituangkan dalam konstitusi baru tahun 1947. Konstitusi baru ini memiliki pengaruh yang amat besar terhadap postur pertahanan Jepang yang membentuk pola politik keamanannya. Keberadaan pasal 9 dalam konstitusi tersebut menghilangkan kekuatan militer Jepang, membatasi tentara Jepang hanya sebagai pasukan bela diri semata, dan menahan Jepang dari berbagai elemen-elemen pertahanan dan militer yang umumnya dimiliki negara lain. Keterbatasan ini menjadi masalah saat situasi

internasional di sekitar Jepang berubah menjadi semakin dinamis, kompleks, dan tidak aman. Untuk itu, postur pertahanan Jepang perlu diperbaiki.

Secara garis besar dalam kurun waktu hampir 20 tahun sejak pasca perang dingin sampai 2014, perkembangan pertahanan Jepang mengalami peningkatan yang signifikan. Kembalinya Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri (PM) membawa spekulasi bahwa Jepang akan semakin pro-militer. Pada masa pemerintahannya yang pertama di tahun 2006, Abe sempat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bernada kanan, meningkatkan patriotisme, dan cenderung meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi salah satu penyebab turunnya popularitas Abe, membawanya turun dari jabatan perdana menteri. Pada masa pemerintahannya yang kedua, bagaimanapun, Abe tetap kembali mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait peningkatan pertahanan, sesuatu yang sebenarnya telah dicanangkan semenjak terbitnya konsep *Dynamic Defense Force* di tahun 2010.

Namun, berbeda dengan sebelumnya, Abe tetap dapat mempertahankan jabatannya. Hal tersebut dikarenakan Abe memiliki posisi dan legitimasi yang lebih kuat dari sebelumnya, dengan dukungan dari LDP sebagai partai mayoritas yang menguasai parlemen, dan tingkat penerimaan rakyat yang mulai membaik dan berpandangan visioner terhadap masa depan Jepang. Kuatnya sumber legitimasi Abe juga disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di Asia Timur yang membuat peningkatan kekuatan pertahanan menjadi lebih mudah diterima. Hal ini juga menyiratkan kemungkinan penerimaan masyarakat Jepang terhadap isu keamanan, termasuk perubahan konstitusi dalam rangka merubah sistem pertahanan Jepang ke arah kemandirian yang akan dilakukan secara kontinyu dan konsisten oleh Abe.

A. Sejarah Pertahanan dan Militer Jepang

A.1. Pertahanan dan Militer Jepang Era Meiji (1868 -1912)

Negara Jepang dipandang sebagai salah satu negara maju di berbagai bidang, baik teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, alam dan tata kotaannya, bahkan etos kerja dan semangatnya. Kemajuan Jepang dalam berbagai bidang tersebut tentu saja tidak terlepas dari sejarah panjang yang telah dialami Jepang. Jepang merupakan negara Asia pertama yang berhasil mengembangkan diri menjadi negara modern yang sejajar dengan negara maju Barat, dalam arti mampu memiliki pemerintahan kuat dan stabil, memiliki kemampuan pertahanan dan militer yang berstandar internasional, memiliki pertumbuhan ekonomi yang dapat memakmurkan rakyatnya, memiliki sistem perdagangan yang diakui secara internasional, memiliki masyarakat perkotaan yang berkembang dengan baik, memiliki kualitas tenaga kerja yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri cadangan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jepang serta dapat mengembangkan sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang dikembangkannya sendiri untuk kemakmuran rakyatnya.

Dalam hal etos kerja ataupun semangat, sejak dahulu orang Jepang dikenal dengan semangat *bushido*²⁴ yang dapat mereka terapkan dalam

²⁴ *Bushido* adalah sebuah kode etik keksatria golongan Samurai dalam feodalisme Jepang. *Bushido* berasal dari nilai-nilai moral samurai, paling sering menekankan beberapa kombinasi dari kesederhanaan, kesetiaan, penguasaan seni bela diri, dan kehormatan sampai mati. Sumber: Wikipedia

berbagai bidang. Ajaran *bushido* berarti menyadari akan kedudukannya masing-masing di dalam hidup ini, mempertinggi derajat dan kecakapan diri, melatih dirinya lahir dan batin, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan tanah air sampai titik darah yang terakhir.

Semangat *bushido* yang terkenal di mata dunia mulai terlihat sejak zaman samurai (zaman Heian tahun 794 sampai restorasi meiji) dimana Jepang masih terbagi-bagi menjadi banyak daerah kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Sejak pemerintahan Jepang menyatu di bawah kekuasaan kaisar Meiji, semangat *bushido* memperlihatkan bahwa mati untuk kaisar adalah bentuk mati yang sempurna dan mulia. Perkembangan semangat *bushido* pada diri orang-orang Jepang tersebut, terutama pada saat Jepang telah mengalami kemajuan modernisasi dari pengaruh-pengaruh Barat, tentu saja membawa orang-orang Jepang mampu bersaing dengan negara-negara Barat.

Pengaplikasian dari semangat *bushido* yang terdapat pada diri bangsa Jepang setelah restorasi Meiji yang membuka diri terhadap dunia luar dapat terlihat dari peta kekuatan militer dan perindustrian Jepang. Sepanjang tahun 1860-an di Jepang benar-benar terjadi perubahan yang luar biasa cepatnya dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan teknologi yang sulit dapat dipercaya.

Dalam hal ini, Jepang dapat menyaingi dan juga dapat disejajarkan dengan negara-negara yang termasuk dengan kekuatan besar dunia. Jepang secara cepat berusaha memperdalam pengetahuan teknologi Barat untuk

keperluan modernisasi pembangunan infrastruktur antara lain memperkenalkan untuk pertama kali jalan kereta api antara Yokohama dan Tokyo yang juga menandai tahap-tahap permulaan terjadinya transformasi untuk menjadi negara modern dengan ambisi mengimbangi kemampuan teknologi dan militer Barat.

Akibat pengaruh Barat, pemerintahan Jepang membentuk kesatuan tentara Jepang pada tahun 1873. Angkatan Perang Jepang dibangun secara modern dengan peralatan yang dibeli dari negara-negara Barat. Namun tidak lama setelah itu Jepang mampu membuat sendiri peralatan-peralatan perang yang bahkan mampu menyaingi peralatan perang dari negara-negara Barat.

Kekuatan militer Jepang berakar sudah cukup lama. Negeri ini telah melewati beberapa periode sejarah yang diwarnai dengan militer. Hal yang berkaitan dengan militer serta tradisi bela diri sangat kuat dalam sejarah Jepang sebelum tahun 1945. Meskipun perkembangan pertahanan dan militer modern Jepang banyak terjadi pada era restorasi Meiji namun seni berperang sudah dimiliki dan menjadi karakteristik masyarakat Jepang kuno.²⁵

Era modern Jepang dalam bidang militer ditandai dengan adanya restorasi Meiji. Restorasi Meiji yang dikenal sebagai *Meiji Ishin* yang berarti revolusi atau pembaruan, adalah rangka kejadian yang menyebabkan perubahan pada struktur politik dan sosial Jepang. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 sampai 1869, tiga tahun yang mengakhiri Zaman Edo dan

²⁵ “Japan The Bushido Code”, diakses dari http://www.photius.com/countries/japan/national_security/japan_national_security_the_bushido_code.html, pada 03 Desember 2014

memasuki Zaman Meiji. Restorasi ini adalah akibat dibukanya Jepang terhadap kedatangan kapal dari dunia Barat yang dipimpin oleh perwira angkatan laut AS Matthew Perry.

Pembentukan aliansi Sat-cho, yaitu antara Saigo Takamori pemimpin Sarsuma dengan Kido Takayoshi, pemimpin Choshu, adalah titik awal Restorasi Meiji. Aliansi ini dicetuskan dengan melawan Keshogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan pada Kaisar.

Restorasi Meiji tidak berjalan dengan mudah, pada Januari 1868 terjadi Perang Bonshin atau Perang Tahun Naga. Pemberontakan yang terjadi antara para mantan Shogun dengan kekaisaran. Akhir dari Restorasi Meiji adalah kekalahan para mantan Shogun dan dan semua musuh Kaisar sehingga kekuasaan penuh berada di tangan Kaisar.²⁶

Pemerintahan yang baru dimaksudkan untuk membentuk Jepang menjadi negara yang lebih demokrat dengan menjamin kesetaraan di antara semua masyarakat. Namun, isu kesetaraan ini kemudian menghilangkan status samurai samurai sebagai satu-satunya kelas dalam masyarakat Jepang yang memiliki kewajiban militer. Pada tahun 1872 menjadi wajib bagi semua masyarakat.²⁷

Tahun 1868 menjadi tonggak era modernisasi militer Jepang. Restorasi Meiji menegaskan kekuatan Barat di Asia. Jepang dipaksa menandatangani perjanjian yang tidak setara dengan Barat, dengan perjanjian ini Barat seakan memiliki legalitas untuk mendapatkan keuntungan yang besar di Jepang.

²⁶ “Restorasi Meiji”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Restorasi_Meiji pada 03 Desember 2014.

²⁷ “Japan The Bushido Code”, *Loc. Cit.*

Angkatan Darat Kekaisaran Jepang (*Dai Nippon Teikoku Rikugun*) atau dalam istilah barat sering disebut sebagai *Imperial Japanese Army* pertama kali terbentuk tahun 1873 setelah terjadi restorasi meiji dimana peran kaum samurai secara resmi dihapuskan dan digantikan oleh tentara reguler ini.

Negara Barat menggunakan kekuatan militer dalam usaha untuk mendapatkan kekuasaan diwilayah Asia, termasuk menekan Jepang dalam hubungan perdagangan tahun 1850-an. Ketika Restorasi Meiji, secara *de facto* kekuatan politik dan administratif berada di tangan para samurai muda yang berkomitmen untuk membuat sistem baru dalam hal modernisasi militer.

Pada tahun 1878 Kantor Umum Tentara Imperial didirikan di bawah pengawasan langsung Kaisar dan memiliki kekuasaan penuh dari perencanaan sampai strategi militer. Kekuatan baru inilah yang menjadi semangat baru samurai. Kesetiaan yang awalnya didedikasikan kepada Raja Feodal berubah menjadi kepatuhan dan kesetiaan kepada Kaisar dan negara. Para tentara tidak hanya menunjukkan kepatuhan kepada Kaisar melainkan juga menunjukkan kesetiaan mereka kepada negara di komunitas masyarakat sehingga *sense of military* benar-benar mengakar di seluruh kelas dalam masyarakat Jepang.²⁸

Kedudukan militer di mata Kekaisaran benar-benar memiliki status yang sangat istimewa. Perintah dari komandan tertinggi kepada tentara militer mempunyai kedudukan yang sama dengan perintah dari Kaisar. Pemimpin

²⁸ “Japan The Modernization of the Military”, diakses dari http://www.photius.com/countries/japan/national_security/japan_national_security_the_modernization_of~454.html pada 03 Desember 2014

tertinggi militer diberikan akses langsung kepada Kaisar serta diberikan kewenangan untuk membuat keputusan atau pengumuman kepada pasukan.²⁹

Secara umum Jepang dalam Periode Meiji telah berkembang menjadi negara moderen dan maju yang juga mulai memperhatikan pembangunan kekuatan pertahanan dan militernya dengan tujuan utama untuk menyamai dan mengimbangi kekuatan Barat. Jepang cenderung membangun Angkatan Darat dengan meniru pola dan juga dilatih oleh Jerman, sedangkan Angkatan Lautnya dilatih oleh Inggris. Apa yang terjadi pada Jepang saat itu, ialah disatu pihak berhasil dalam memodernisasikan diri baik bidang sosial-politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, maupun kebudayaanya sebagai satu negara yang modern, disisi lain Jepang tetap berpegang teguh pada tradisi dan adat istiadatnya terutama dalam hubungan sosial.

Bukti kekuatan militer Jepang era Meiji adalah ketika konflik kepentingan antara Jepang dan Tiongkok di Korea menyebabkan terjadinya perang Tiongkok-Jepang tahun 1894-1895. Jepang berhasil mengalahkan Tiongkok dan Pulau Taiwan diserahkan kepada Jepang. Konflik antara Rusia dengan Jepang mengenai Korea dan Manchuria mengakibatkan Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904-1905. Pasukan Darat Jepang juga berhasil mengalahkan Rusia dan Jepang memperoleh reputasi internasional sebagai negara yang memiliki kekuatan politik dan militer yang harus diperhitungkan oleh negara-negara Barat.

²⁹ Sugeng Riyanto, *Op. Cit.* Hal. 20.

Kemenangan Jepang atas Rusia tersebut menyebabkan kedudukan politik Jepang semakin kokoh di wilayah Manchuria. Tahun 1910 Jepang menguasai sepenuhnya semenanjung Korea. Kemenangan Jepang atas Rusia juga mendatangkan satu kekaguman dari bangsa-bangsa di Asia. Tak dielakan lagi kemenangan tersebut ternyata menumbuhkan rasa percaya diri orang pribumi untuk melawan dominasi Barat yang menjajah negaranya.

Untuk memodernisasi tekhnik bertempur dari pasukan Jepang, maka banyak perwira-perwira militer asing yang didatangkan sebagai penasehat atau instruktur oleh pemerintah. Kemudian para calon perwira yang telah lulus akademi militer dikirim keluar negeri untuk melanjutkan pendidikan militernya di Eropa sebagai atase militer disana. Dan kembalinya ke negeri Jepang, mereka akan menerapkan segala ilmu pengetahuan militer yang mereka dapat selama studi disana.

Tapi pembahasannya sengaja dipersempit pada Angkatan Darat (*Rikugun*) dalam kurun waktu 1937 sampai 1945 karena dalam rentang waktu tersebut militer jepang tak hanya Angkatan Darat bahkan Angkatan Laut (*Kaigun*) telah sampai pada klimaks perkembangannya hingga terpaksa membuka mata lebar-lebar negara barat yang sebelumnya memandang remeh negeri asia tersebut.

Dalam waktu-waktu tersebut jepang terlibat dalam dua perang besar yaitu Sino-Japan war dan Pacific war atau Perang Asia Timur Raya (*Dai Toa*

Senso Senkum) walau pada akhirnya Angkatan Perangnya dibubarkan karena kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.³⁰

A.2. Pertahanan dan Militer Jepang Era Perang Dunia I

Era Perang Dunia I merupakan era kepemimpinan Kaisar Taisho menggantikan Kaisar Meiji. Zaman Taisho atau Periode Taisho (30 Juli 1912 - 25 Desember 1926) adalah salah satu nama zaman pemerintahan Kaisar Jepang sewaktu Kaisar Taisho (Yoshihito) memerintah Jepang, sesudah zaman Meiji dan sebelum zaman Showa. Kaisar Yoshihito tidak berada dalam kondisi kesehatan yang baik, sehingga terjadi pergeseran kekuatan politik dari negarawan senior (*genro*) ke Parlemen Jepang dan partai-partai politik. Oleh karena itu, periode ini juga disebut masa gerakan liberal yang disebut demokrasi Taisho. Istilah demokrasi *Taisho* dipakai untuk membedakan periode ini dari kekacauan zaman Meiji dan paruh pertama zaman Showa ketika Jepang jatuh ke dalam militerisme.³¹

Setelah Perang Dunia I lahirlah Demokrasi Taisho di Jepang, pada tahun 1918 Hara Takahashi menjadi Perdana Menteri. Pada zaman ini, dibawah kepemimpinan kaisar Taisho, Jepang terus berkembang sebagai negara maju dan modern. Kelanjutan modernisasi dari zaman Meiji pada saat itu semakin pesat dan drastis. Peningkatan di setiap bidang telah menunjukkan keperkasaan Jepang di Asia dan lebih dari pada itu, Jepang telah disejajarkan dengan negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, Portugis dan negara maju lainnya. Era Taisho telah menyumbangkan lebih

³⁰ *Ibid*, Hal. 21-23.

³¹ "Zaman Taisho", diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/ZamanTaisho> pada 10 Desember 2014

banyak perubahan, dan dapat dikatakan modernisasi ketika itu telah mencapai kemajuan yang luar biasa. Pada era Taisho disadari bahwa modernisasi telah memiliki caranya tersendiri dalam mencapai puncak yang terkadang menakutkan dan terkadang juga menegangkan. Bertolak belakang dengan cara penyerapan kebudayaan dari Tiongkok yang terkesan santai pada 1.300 tahun lalu.

Pada tahun 1914 di Eropa terjadi Perang Dunia I (1914-1918). Dalam Perang Dunia I, Jepang tergabung dalam pasukan Sekutu, tapi hanya memainkan peranan kecil dalam pertempuran melawan pasukan kolonial Jerman di Asia Timur. Jepang bersekutu dengan Inggris dan mendeklarasikan perang melawan Jerman pada tanggal 23 Agustus 1914. Jepang pun menduduki daerah jajahan Jerman yang ada di Tiongkok (di Shantung) seperti Shandong dan Jiaozhou. Dan dengan direbutnya kepulauan Caroline dan Tsiangtao dari tangan Jerman.

Pada era Perang Dunia I Jepang melaksanakan politik luar negeri yang kurang aktif karena kekecewaan terhadap Jerman yang melakukan aksi militernya di Asia Timur. Di lain pihak Jepang juga merasa sangat kecewa terhadap sekutunya ketika Liga Bangsa-Bangsa menolak usulannya untuk menghilangkan sikap rasialis dalam konferensi Paris 1919 karena ditentang oleh Inggris dan Australia. Pada tahun 1924 misalnya, Kongres AS menyetujui undang-undang yang melarang imigran Jepang ke AS.

Selain itu kepasifan militer Jepang pada Perang Dunia I menyebabkan permasalahan tersendiri bagi Jepang, karena semakin kuatnya kepentingan

politik dan diplomasi negara yang terus berusaha memperkuat peranannya dalam kehidupan politik dalam maupun luar negeri menjadi persoalan yang cukup menarik untuk dihadapi Taisho. Demi menghindari kecurigaan dunia, Jepang menyatakan melalui perdana menteri bahwa ia tidak memiliki kehendak untuk merampas wilayah Tiongkok malah Jepang ingin wilayah Tiongkok kembali seutuhnya yang telah direbut Jerman. Namun belakangan Jepang berbuat melebihi hak-hak istimewa yang pernah didapat Jerman, hal itu juga yang membuat Amerika sesekali mengimbuu Jepang.

Pada saat itu, Presiden Yuan Shi Kai tidak memihak kepada negara manapun dalam Perang Dunia I. Namun, beliau hanya mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Jepang tanggal 18 Januari 1915 agar Jasirah Shandong dikembalikan kepada Tiongkok seutuhnya. Surat ini membuat Jepang marah karena mereka menganggap bahwa Presiden Yuan tidak bersahabat. Dalam hal ini Jepang mengajukan tuntutan kepada Tiongkok yang meliputi 21 pasal, yang kemudian dikenal dengan sebutan Dua Puluh Satu Tuntutan atau *The Twenty One Demands*, pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:³²

- a. Jepang berhak menduduki Manchuria Selatan, Jasirah Shandong, Mongolia Dalam, dan wilayah perbatasan di Tiongkok bagian Tenggara Tiongkok.
- b. Jepang memperluas hak-hak khusus mengenai kereta api di Manchuria dan Mongolia.

³² R. H. P. Mason dan J. G. Caiger, *A History of Japan*, Tuttle Publishing, Tokyo, 1997, Hal. 304.

- c. Jepang diberi kekuasaan untuk mengawasi pabrik besi dan baja terbesar di Tiongkok, yaitu pabrik Han Yeh Ping.
- d. Jepang menempatkan penasihat di ibu kota Tiongkok (yang tidak lebih dari hak untuk turut campur dalam politik dalam negeri Tiongkok).
- e. Para penasihat Jepang di bidang politik, keuangan, militer, dan diberi hak untuk mengadakan operasi bersama di bidang kepolisian di daerah-daerah strategis.
- f. Pembelian peluru dan mesiu Tiongkok, minimal 50% harus dari Jepang.

Adanya kerjasama dalam pembangunan pabrik senjata. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, maka Jepang akan menggunakan kekerasan senjata, dan akan memberi bantuan kepada kaum revolusioner. Yuan Shi Kai selaku presiden tidak mau mengabulkan permintaan ini, sehingga Jepang memberikan ultimatum pada tanggal 7 Mei 1915. Akhirnya Yuan mengabulkan permintaan Jepang, tetapi hanya tiga bagian pertama saja yang diterima dengan beberapa perubahan yang meringankan. Hal ini membuat rakyat Tiongkok kecewa.

Selain memperluas kontrol atas kepemilikan Jerman, Manchuria, dan Mongolia, Jepang juga mencari kerja sama untuk memiliki kompleks pertambangan dan metalurgi di Tiongkok Tengah. Akhirnya Jepang menarik tuntutan tersebut pada Mei 1915 setelah timbul anti-Jepang di Tiongkok dan kecaman dunia internasional.

Kekuatan Jepang di Asia tumbuh dengan runtuhnya rezim Tsar di Rusia dan kekacauan Revolusi Bolshevik tahun 1917 di Siberia. Kesempatan tersebut digunakan Jepang untuk menduduki Siberia. Tapi untuk melakukannya Jepang harus bernegosiasi dengan Tiongkok agar bisa mendapatkan tempat transit untuk pasukan Jepang. Akhirnya pada tanggal 2 November 1917, diadakan perjanjian *Ishii-Lansing* yang menghasilkan kebijakan "Pintu terbuka", yang isinya:³³

- a. Amerika Serikat mengiktiraf kedudukan Jepang yang mempunyai kepentingan yang istimewa di Tiongkok.
- b. Jepang dan Tiongkok menganggap ia satu pengiktirafan tentang kedudukan pada 1917.

Pada bulan Juli 1918, Jepang mengirimkan 75.000 tentaranya ke Siberia. Tahun 1919, sebagai negara yang menang perang, Jepang menghadiri Konferensi perdamaian yang diselenggarakan di Paris. Dan pada tahun 1920 terbentuk Liga-Liga Bangsa dan Jepang menjadi anggota tetap dewan keamanan. Dalam Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919, usulan Jepang mengenai "persamaan ras" pada hadirin Liga Bangsa-Bangsa ditolak oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Arogansi dan diskriminasi ras menyebabkan ketegangan dalam hubungan Jepang-Barat sejak dibukanya negara tahun 1880-an, dan menjadi faktor utama dalam memperburuk hubungan selama PD II. Tahun 1924, misalnya, Kongres AS mengeluarkan

³³ *Ibid*, Hal. 305.

Perintah Pengusiran yang melarang imigran dari Jepang datang lebih banyak lagi.³⁴

Pada tanggal 13 Desember 1921 ditandatangani Perjanjian Empat Kekuatan (*Four Power Treaty*) Jepang, Amerika Serikat, Britania, dan Perancis sepakat untuk mengakui status quo di Pasifik. Kemudian tanggal 6 Februari 1922 ditandatangani Perjanjian Perlucutan Senjata Lima Kekuatan (*Five Power Naval Disarmament Treaty*). Dalam perjanjian tersebut disepakati rasio jumlah kapal adalah 5:5:3:1,75:1,75 masing-masing untuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Perancis, dan Italia. Upaya pembatasan persenjataan, yang menjadi ramai khususnya antara negara-negara besar dewasa ini, rupanya bukan barang baru. Sudah pernah dilakukan sekitar 60 tahun berselang, meskipun belum menyangkut persenjataan nuklir seperti sekarang.³⁵

Perjanjian yang pertama di dunia tersebut melibatkan lima negara dengan kelautan yang kuat yaitu: AS, Inggris, Jepang, Prancis, dan Italia. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 6 Februari 1922, dengan isi perjanjian mengenai *Five Power Naval Disarmament Treaty*, yaitu pembatasan persenjataan laut, terutama armada kapal perang yang membahayakan dunia. “Tiga besar” AS, Inggris, dan Jepang setuju segera mencoret sekitar separuh dari jumlah kapal perang mereka, dan membekukan pembuatan kapal perang baru dalam masa sepuluh tahun. Adapun yang disepakati kelima negara adalah pembatasan jumlah tonase kapal perang dan kapal pengangkut

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

pesawat terbang. Juga ukuran kapal tertentu, serta kaliber maksimum meriam kapal. Serta sepakat untuk membatasi diri dalam mendirikan pangkalan angkatan laut dikawasan Pasifik.³⁶

Tanggal 6 Februari 1922 ditandatangani Perjanjian *Nine Power Treaty* yaitu Belgia, Tiongkok, Belanda, dan Portugal, bersama dengan lima kekuatan yang asli. Persetujuan tersebut melahirkan kesepakatan untuk mencegah perang di Pasifik. Mereka setuju untuk menghormati Tiongkok merdeka. Jepang juga sepakat untuk menarik pasukannya dari Shandong dan menarik pasukannya dari Siberia.³⁷

Kondisi Jepang akibat adanya perpecahan di Diet dan koalisi yang tidak stabil pada tahun 1927, menghasilkan terbentuknya *Rikken Minseito* (Partai Demokrat Konstitusi) yang merupakan gabungan *Kenseikai* (Kumpulan Konsititusi Pemerintah) dan *Seiyūhonto* (True Seiyu). Setelah itu, sampai 1932, *Seiyukai* dan *Rikken Minseito* berganti dalam kekuasaan.³⁸

Militer Jepang mencoba untuk tidak hanya kuat dalam hal mengenai keamanan negara saja, melainkan dari segi sosial maupun politik. Keberadaan militer Jepang memegang pengaruh dan kendali yang sangat kuat. Keadaan Jepang dalam periode Kaisar Taisho memang ditandai oleh berbabagai peristiwa politik yang mengarah pada bentuk-bentuk perebutan pengaruh dan upaya mencari keseimbangan politik antara kepentingan pihak politisi dan kalangan militer.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*, Hal. 306.

Pembentukan angkatan militer Jepang, dan juga penumbuhan kembali semangat bushido dalam diri setiap anggota militer Jepang, membuat Jepang mampu melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah negaranya. Politik imperialisme yang berusaha dijalankan oleh Jepang tersebut dipilih oleh kebijakan pemerintah karena politik tersebut dirasa sebagai cara yang paling tepat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam negeri Jepang sendiri. Pada saat itu, permasalahan berat yang sedang dialami Jepang adalah meningkatnya pertumbuhan perindustrian yang sangat pesat, yang tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan bahan mentah untuk diolah sebagai bahan industri. Masalah tersebut mengantarkan Jepang pada keputusan untuk melakukan imperialisme kepada negara-negara lain untuk mencari wilayah baru. Jadi, gerakan imperialisme Jepang ini bukan hanya semata-mata gerakan militer, tetapi sekaligus merupakan perluasan perdagangan Jepang. Gerakan imperialisme Jepang diawali melalui ekspansi ke daerah sekitar-sekitar Jepang, yaitu Tiongkok, Korea, dan Manchuria. Ekspansi Jepang tersebut yang nantinya akan membawa Jepang sebagai salah satu pelaku dalam Perang Pasifik dan juga Perang Dunia ke-II.

A.3. Pertahanan dan Militer Jepang Era Perang Dunia II

Berperannya Jepang dalam perang yang terluas dan terbesar dalam sejarah ini berada pada era atau zaman Hirohito. Pada masa ia bertakhta, Hirohito menghadapi pertentangan serta peperangan di dalam negerinya sendiri. Kericuhan terjadi karena adanya pertentangan antara kelompok moderat dengan golongan kanan ultranasionalis yang disokong oleh militer

Angkatan Darat yang merupakan kekuatan terbesar didalam negeri pada saat itu.

Akibatnya sejumlah pejabat tinggi, pengusaha dan tokoh-tokoh penting negara terbunuh dan puncaknya adalah insiden militer pada 26 Februari 1936, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Saburo Aizawa bersama 1500 prajurit. Peristiwa ini juga melibatkan pangeran Yashuhito Chichibu sehingga Kaisar Hirohito sendiri turun tangan dan memerintahkan pasukan angkatan bersenjata kekaisaran untuk menyelesaikan kekacauan ini dan untuk memastikan loyalitas dari seluruh keluarga kekaisaran. Meskipun demikian diam-diam insiden ini "direstui" oleh kalangan pimpinan Angkatan Darat terutama dari kalangan ultranasionalis. Oleh karena itu pada tahun 1930 ultranasionalis dan militer menguasai pimpinan pemerintahan. Tercatat pada masa kekaisaran Hirohito Jepang tercatat terlibat di beberapa peperangan besar di antaranya Insiden Manchuria 1931, Insiden Nanking 1937, dan Perang Dunia II dengan melancarkan serangan ke Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour 9 Desember 1941.³⁹

Perang Dunia II adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak negara di dunia termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan: Sekutu dan Poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan "perang total", negara-negara besar

³⁹ "Hirohito", diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Hirohito>, pada 10 Desember 2014

memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer.

Perang ini ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massal warga sipil, termasuk *holocaust* dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan, perang ini memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia II konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia.

Sebelum masuk pada Perang Dunia II, Kekaisaran Jepang berusaha mendominasi kawasan Asia Timur dan sudah memulai perang dengan Republik Tiongkok pada tahun 1937, tetapi perang dunia secara umum pecah pada tanggal 1 September 1939 dengan invasi Jerman ke Polandia yang diikuti serangkaian pernyataan perang terhadap Jerman oleh Inggris dan Prancis.⁴⁰

Perang Pasifik atau Perang Asia Pasifik, atau yang dikenal di Jepang dengan nama Perang Asia Timur Raya (*Greater East Asia War*) adalah perang yang terjadi di Samudra Pasifik sampai meliputi pulau-pulau di Asia. Konflik ini terjadi antara tahun 1937 sampai 1945, diawali dengan Insiden Jembatan Marco Polo pada 8 Juli 1937. Peristiwa tersebut menyulut peperangan antara Tiongkok dengan Jepang. Konflik antara Jepang dan Tiongkok serta beberapa dari peristiwa penting juga merupakan bagian dari perang tersebut.

⁴⁰ “Perang Dunia II”, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II pada 10 Desember 2014.

Perang ini terjadi antara Jepang dan pihak Sekutu (yang termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, Filipina, Australia, Belanda dan Selandia Baru). Uni Soviet berhasil memukul mundur Jepang pada tahun 1939, dan tetap netral hingga 1945, saat ia memainkan peranan penting di pihak Sekutu pada masa-masa akhir perang. Namun peristiwa-peristiwa yang lebih penting terjadi setelah 7 Desember 1941, ketika Jepang menyerang Amerika Serikat serta wilayah-wilayah yang dikuasai Britania Raya dan banyak negara lain serta yang dikuasai oleh sekutu.⁴¹

Thailand, setelah dijajah pada 1941, dipaksa bergabung dengan pihak Jepang. Jerman Nazi dan Italia juga adalah sekutu Jepang, dan angkatan laut mereka beroperasi di Samudra Pasifik dan Hindia antara tahun 1940 dan 1945. Antara tahun 1942 sampai 1945, terdapat empat wilayah otorita Sekutu yang berperang melawan Jepang: Tiongkok, wilayah Samudra Pasifik, Asia Tenggara dan wilayah Pasifik Barat Daya.⁴²

Masuknya Jepang sebagai aktor dalam Perang Dunia II diawali karena konflik dan perundingan yang dinilai Jepang tidak memihak pada Jepang. Sikap AS yang keras serta rasis yang diterima oleh Jepang membuat Jepang pada akhirnya membuat perjanjian dengan pemerintah Vichy Perancis, untuk kemudian bergabung dengan Jerman dan Italia melawan pihak Sekutu. Tahun 1941 Duta Besar Jepang di AS Admiral Nomura Kichisaburo dengan Menlu AS Cordell Hull mengadakan sebuah perundingan bilateral guna mencari penyelesaian bilateral antara kedua Negara. Tawaran baru Jepang

⁴¹ Abdul Irsan, *Op. Cit.* Hal. 43.

⁴² "Perang Pasifik", diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Pasifik, pada 10 Desember 2014.

ditolak oleh AS, karena dari sudut pandang AS usulan Jepang dinilai masih tidak memenuhi kepentingan AS. Kegagalan upaya diplomasi menyebabkan Jepang sangat kekurangan akan suplai minyak dan semakin meningkatkan sikap anti AS di dalam negeri Jepang.⁴³

Rakyat Jepang merasa kehidupannya telah dicekik oleh perbuatan AS dan hal ini menyulut kebencian rakyat serta militer Jepang semakin besar. Kegagalan perundingan tersebut disinyalir karena ulah kelompok garis keras yang menentang Jepang serta menginginkan perang karena meremehkan Jepang. AS menuntut Jepang menarik pasukannya dari Manchuria serta membatalkan Pakta Berli antara Jepang, Jerman, dan Italia. Jendral Mac Arthur di depan senat AS bulan Mei 1941 antara lain mengatakan mengapa Jepang berperang dengan AS adalah karena tidak dimilikinya sumber daaya alam dan Jepang merasa tidak mendapatkan jaminan suplai keperluannya dari luar negeri. Selanjutnya ia mengatakan "*Their purpose, therefore, in going to war largely dictated by security.*"⁴⁴

Dari segi pandangan pihak Jepang, tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk tidak bersikap anti Barat. Pihak Barat selama ini khususnya AS dan Inggris menerapkan politik yang tidak adil terhadap Jepang. Tahun 1863 armada Inggris pernah melakukan bombardemen di kota Kagoshima hanya karena beberapa warga negara Inggris mati terbunuh oleh beberapa orang samurai karena masalah pertengkaran pribadi. Demikian juga ketika Komodor Matthew Perry pada tahun 1854 yang memaksa Jepang membuka

⁴³ Abdul Irsan, *Op. Cit.* Hal. 43.

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 44.

pelabuhan untuk keperluan logistik armada pencari ikan paus AS yang berlabuh di Jepang. Matthew Perry bahkan mengultimatum akan mengebom ibu kota Jepang apabila Jepang tidak bersedia membuka pelabuhannya.

Selain itu AS tidak pernah menerima kepentingan Jepang di wilayah Asia Timur khususnya atas wilayah Manchuria. Bagi Jepang agresinya di Tiongkok adalah dalam rangka mengimbangi kekuatan komunis Uni Soviet yang mulai menunjukkan aktifitasnya di Asia Timur. Sikap AS yang mendukung dan membela rezim Kuomintang Chiang Kai Sek dengan membentuk pasukan khusus sebagai bagian dari pasukan Kuomintang dan Angkatan Udara Tiongkok. Kerasnya sikap AS terhadap Jepang dalam kasus Manchria ini juga merupakan salah satu alasan keluarnya Jepang dari Liga Bangsa-Bangsa 1933.⁴⁵

Pada 3 November 1938 Perdana Menteri Jepang Fumimaro Konoe membentuk semacam kerjasama untuk menyatukan kekuatan seluruh Asia Timur di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang. AS bersikap menentang dengan penuh kecurigaan terhadap kebijakan politik luar negeri Jepang. Bulan Juli 1939 AS membatalkan Perjanjian Perdagangan dan Navigasinya yang tentunya sangat mengagetkan pihak Jepang. Pertengahan tahun 1941 AS kemudian melakukan embargo ekspor *scrap iron* dan minyak, termasuk pelarangan semua macam minyak untuk keperluan penerbangan (avtur).⁴⁶

Protes pihak Jepang tidak dihiraukan lagi oleh AS, bahkan kemudian di bulan Juli 1941 semua aset Jepang di AS dibekukan. Selama itu Jepang

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 45.

⁴⁶ *Ibid*

menjadi objek “disinformasi” pihak Barat yang menciptakan opini publik yang sering memojokan Jepang dan membela kepentingan maupun kebijakan politik regional maupun global pihak Barat, khususnya AS dan Inggris. Hubungan antara Jepang dan pihak Barat yang semakin meruncing menyebabkan Jepang menandatangani “pakta triparte” pada September 1940 antara Jepang, Italia, dan Jerman. Setelah menandatangani “pakta triparte” tersebut kabinet Jepang membahas mengenai pembentukan “Persemakmuran Asia Timur Raya” yang meliputi wilayah Tiongkok, Indocina, Malaya, Thailand, Burma, Filipina, Borneo Inggris, beberapa kepulauan Oceania dan Indonesia (Hindia Belanda).⁴⁷

Tanggal 26 November 1941 pihak AS memaksa Jepang untuk mengembalikan posisi wilayah seperti pada keadaan sebelum 18 September 1931, yaitu Jepang harus mundur dari semua wilayah yang telah didudukinya selama sepuluh tahun terakhir. Pihak Jepang mengupayakan hubungan antara Jepang dan AS bisa menjadi lebih baik apabila AS mau mengerti dan menerima kepentingan nasional Jepang atas wilayah Asia Timur. Pihak Jepang mengartikan sikap AS tersebut sebagai ultimatum yang tidak mungkin dapat diterima pihak Jepang. Salah satu permintaan AS yang tidak dapat diterima Jepang adalah tekanannya agar Jepang membatalkan “pakta tripartite” karena sebagai negara yang memiliki kedaulatan berhak untuk menandatangani perjanjian dengan negara manapun yang

⁴⁷ *Ibid*, Hal. 46

dikehendaknya. Dalam kondisi seperti ini Jepang merasa tidak dapat berbuat lain kecuali menghadapi kemungkinan peperangan dengan pihak AS.

Tanggal 7 September 1941 berlangsung pertemuan rahasia di istana kekaisaran yang dihadiri oleh Kaisar Hirohito. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang yang memutuskan bahwa “untuk menjaga dirinya sendiri dan mempertahankan diri, Jepang bersiap diri untuk melakukan peperangan melawan AS, Inggris dan Hindia Belanda pada pertengahan bulan oktober, kecuali apabila pertemuan bilateral antara AS dengan Jepang memberi hasil yang memuaskan bagi kepentingan Jepang”. Tidak seorangpun dalam rapat tersebut mengeluarkan pendapatnya, karena hampir seluruh mereka yang hadir ketika itu sebenarnya mengambil sikap untuk maju perang menghadapi arogansi AS. Pertemuan rahasia kekaisaran tersebut memutuskan bahwa Jepang siap untuk maju perang.⁴⁸

Sementara persediaan menipis dan militer Jepang memperhitungkan bahwa serangan tidak akan bisa diluncurkan setelah musim panas 1942. Selain itu pihak Jepang berusaha memenangkan perundingan dengan AS, sementara angkatan laut Jepang benar-benar mempersiapkan diri untuk mengumpulkan segala informasi mengenai Angkatan Laut AS di Hawaii dan semua lokasi pertahanan yang dimiliki AS di Pearl Harbour. Serangan mendadak terhadap Pearl Harbour tanpa sepengetahuan AS sudah dipersiapkan dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut di Pantai selatan Pulau Oahu sekitar 10 km di sebelah barat Honolulu.

⁴⁸ *Ibid*

Tanggal 26 November 1941 *task force* Jepang yang terdiri atas 2 kapal perang, 6 kapal induk dengan sejumlah sekitar 350 pesawat terbang, 9 kapal perusak, dan 3 kapal selam, di bawah pimpinan *Vice Admiral* Chuichi Nagumo meninggalkan kepulauan Kuril. Waktu matahari mulai terbit pada tanggal 7 Desember 1941 Jepang memulai penyerangannya ke pangkalan Angkatan Laut di Pulau Oahu. Dari serangan tersebut Jepang berhasil menenggelamkan 4 kapal perang AS, 2 kapal perusak, 1 kapal penyapu ranjau, 6 kapal perang, 3 penjelajah dan 1 kapal perusak. 200 kapal terbang dihancurkan, 2.325 tentara dan 60 orang pegawai sipil gugur. Pihak Jepang kehilangan 29 pesawat terbang dan 5 kapal selam mini (*midget submarine*). Tanggal 8 Desember 1941 AS dan Inggris menyatakan perang terhadap Jepang.⁴⁹

Keberhasilan Jepang dalam melaksanakan strategi perang menunjukan supremasi Angkatan Lautnya. Setelah penyerangan tersebut Jepang dengan waktu yang relatif singkat dapat menguasai hampir seluruh wilayah Pasifik dan menduduki wilayah seluas 3.800.000km² dari perbatasan dengan India sampai ke New Guinea yang memiliki penduduk sebanyak 150 juta jiwa hanya dalam waktu 6 bulan. Satu persatu pertahanan Sekutu menyerah kepada pasukan Jepang. Singapura yang dipertahankan oleh 100.000 pasukan dengan perlengkapan militer yang canggih juga bertekuk lutut. Menyerah kepada Jepang tanpa ada perlawanan. Jatuhnya Singapura pada

⁴⁹ *Ibid*

Februari 1942 bagi Churchill merupakan malapetaka yang besar bagi sejarah militer Inggris.

Akan tetapi keberhasilan dari serangan yang diluncurkan Jepang tidak bertahan lama atau bahkan tidak sesuai yang direncanakan. Walaupun hampir seluruh wilayah Asia Pasifik dikuasai Jepang, akan tetapi Jepang justru mengalami keterbatasan akan bahan bakar dan sumber daya alam. Ladang minyak di Hindia Belanda maupun wilayah lainnya bekas jajahan Sekutu sudah dibumi hanguskan terlebih dahulu sebelum jatuh ke tangan Jepang. Hal ini menyebabkan Jepang tidak dapat melaksanakan perang dalam jangka waktu yang lama. Disisi lain pihak Sekutu melakukan konsolidasi terkait kekuatan bersenjata serta kemampuan industri perang. Pihak Sekutu mulai menekan militer Jepang setelah paruh tahun 1942. Kekalahan Jerman dan Italia di Eropa menyebabkan pasukan Sekutu lebih mampu mengkonsentrasikan diri menghadapi pasukan Jepang di pasifik. Pertempuran di Midway bulan Juni 1942 merupakan titik balik dalam Perang Pasifik.⁵⁰

Pasukan Sekutu berangsur-angsur berhasil menguasai medan perang dan kembali menduduki wilayah yang pernah dikuasai Jepang. Selama berperang di Pasifik, pihak Sekutu harus menghadapi *spirit of Japan* yang tetap bersikeras untuk bertahan dan tidak mau menyerah. Tanggal 27 Juli 1945 di Postdam Declaration sebenarnya pihak Sekutu sudah pernah mendesak Jepang untuk segera menyerah tanpa syarat, tetapi pihak militer Jepang tetap

⁵⁰ *Ibid*

menolaknyanya. Pada Tanggal 6 dan 9 Agustus bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kaisar Showa tanggal 14 Agustus akhirnya menyiarkan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu. Jepang secara resmi menandatangani dokumen penyerahan pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal perang AS Missouri yang berarti sejak saat itulah seluruh wilayah Jepang secara resmi berada di bawah kekuasaan Sekutu yang dalam pelaksanaannya lebih dikuasai oleh pihak Amerika Serikat.⁵¹

Sebelum Kaisar Hirohito akan mengumumkan menyerahnya Jepang tanpa syarat sebagai pernyataan kalah perang terhadap Sekutu, suasana di lingkungan sekitar kediaman resmi Kaisar Jepang menunjukkan keadaan yang cukup dramatis. Beberapa kalangan militer tidak dapat menerima dan sulit mengakui kekalahan. Halaman istana kaisar berceceran dengan darah karena karena banyak masyarakat yang melakukan aksi *harakiri*⁵² atau upacara bunuh diri di depan istana ketika Kaisar tetap berikukuh menyatakan menyerah. Mereka yang melakukan *harakiri* tersebut sebagai pernyataan permohonan maaf kepada kaisar sebagai penguasa Jepang. Ketidakrelaan untuk menyerah juga mengakibatkan beberapa pengawal melakukan pemberontakan dengan mengepung istana kaisar. Namun pemberontakan tersebut dapat segera dipadamkan setelah komandan pengawal berhasil dibunuh.

⁵¹ *Ibid*, Hal. 47.

⁵² *Harakiri*, atau *seppuku* arti harfiah: "potong perut" adalah suatu bentuk ritual bunuh diri yang dilakukan oleh samurai di Jepang dengan cara merobek perut dan mengeluarkan usus untuk memulihkan nama baik setelah kegagalan saat melaksanakan tugas dan/atau kesalahan untuk kepentingan rakyat. *Seppuku* dulu hanya dilakukan oleh samurai. Sumber: wikipedia

Kalau memperhatikan kata-kata yang diucapkan oleh Kaisar Showa pada tanggal 1 Agustus 1945 melalui siaran radio Jepang kepada rakyatnya. Tampak jelas bahwa Kaisar berusaha mengimbangi kesediannya untuk menyerah kalah dengan tetap memperhatikan harga diri bangsa Jepang agar tidak terlalu terhina di mata dunia. Hal ini terutama untuk menghindari reaksi keras dari kelompok konservatif Jepang yang masih ingin tetap bertahan karena merasa tidak rela bangsanya harus dijajah oleh bangsa lain.⁵³

Setelah Perang Asia (*Dai Toa Senso*) selesai, banyak desakan agar kaisar Hirohito diadili sebagai penjahat perang. Ada banyak keterangan kontroversial mengenai keterlibatannya dalam perang baik sebelum maupun pada saat Perang Dunia II. Di antaranya adalah David Bergammi dalam bukunya *Japan Imperial Conspiracy* yang mengatakan bahwa kaisar terlibat dalam perencanaan perang. Namun banyak pula yang tidak setuju dengan alasan bahwa dia hanyalah sebagai simbol dan pemimpin agama sebagaimana kaisar-kaisar periode sebelumnya Shogun sekalipun pada saat itu berkedudukan sebagai komando tertinggi.⁵⁴

Menteri Peperangan Amerika Serikat Henry Stimson mengatakan "*Tidak menurunkan kaisar Jepang dari takhtanya akan memudahkan proses penyerahan dan menghindarkan peperangan yang dapat merugikan khususnya pasukan pendudukan, yang kita lakukan terhadap Kaisar Jerman pasca Perang Dunia I sehingga publik menganggap kaisar Jerman adalah*

⁵³ Abdul Irsan, *Loc. Cit.*

⁵⁴ "Hirohito", <http://id.wikipedia.org/wiki/Hirohito> diakses pada 15 Desember 2014.

musuh, setan (devil), mengakibatkan kekosongan kekuasaan dan tata pemerintahan di wilayah itu sehingga memunculkan Adolf Hitler".⁵⁵

Sekalipun banyak desakan dari berbagai pemimpin dunia agar Kaisar Hirohito diadili, termasuk diantaranya Presiden Amerika Serikat Harry S Truman meskipun akhirnya Presiden Truman setuju untuk mempertahankan kedudukan kaisar. Panglima pendudukan, Jendral Douglas McArthur juga tetap menempatkan Hirohito pada takhtanya sebagai simbol dan memperlancar pembangunan kembali Jepang dan simbol keterpaduan Kaisar dengan rakyatnya terutama pada masa pendudukan. Kedudukan Kaisar pada takhtanya didasarkan pada konstitusi baru yang diterapkan 3 Mei 1947 yang dinamakan Konstitusi Jepang 1947 atau konstitusi pasca perang yang menetapkan kaisar sebagai lambang atau simbol dan kepala negara sebagaimana kerajaan atau monarki konstitusional. Konstitusi ini menggantikan Konstitusi Jepang 1889 pada era Meiji dimana kaisar sebagai pemegang komando dan kekuasaan tertinggi.⁵⁶

A.4. Perkembangan Pertahanan dan Militer Jepang Pasca Perang Dunia II sampai Perang Dingin

Pada saat Perang Dunia II, Jepang sebagai negara penyerang menduduki negara Asia, terutama Tiongkok dan Korea. Berakhirnya Perang Dunia II merupakan kesempatan bagi mereka untuk merdeka dan melepaskan diri dari pendudukan dan penjajahan Jepang. Pada saat yang sama, pembentukan Persatuan Bangsa-Bangsa di dunia yang menjadi dasar Tata Tertib Peraturan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Internasional resmi berdiri tanggal 24 Oktober 1945, dan mengadopsi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 sebagai setandar umum bagi semua negara anggotanya.

Sebagai negara yang kalah perang, Jepang tidak mempunyai kewenangan apapun dalam aspek militer atau pertahanan. Tugas militer Jepang pasca Perang Dunia II menjadi tugas internasional. Sebagai negara, kedaulatan Jepang seakan dikebiri karena tidak mempunyai kewenangan, kemampuan dan otonomi untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan perjanjian Westphalia (1648). Karena selain militer, aspek kehidupan politik Jepang sepenuhnya berada dalam kewenangan Amerika Serikat.⁵⁷

Dampak yang sangat memukul bagi pertahanan dan militer Jepang adalah diberlakukannya Pasal 9 dalam Konstitusi Jepang di rancang oleh sekutu terutama Amerika Serikat. Pasal 9 ditambahkan ke dalam Konstitusi Jepang pada masa pendudukan Sekutu atas Jepang se usai Perang Dunia II. Pasal 9 Konstitusi Jepang adalah suatu klausul dalam Konstitusi Nasional Jepang yang melarang dilakukannya perang oleh negara. Konstitusi ini mulai berlaku pada 3 Mei 1947, yaitu segera setelah selesainya Perang Dunia II. Dalam naskahnya, negara secara resmi menolak perang sebagai suatu hak kedaulatan dan melarang penyelesaian sengketa internasional melalui penggunaan kekuatan terutama melalui langkah militer. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa Jepang tidak akan mempertahankan kembali angkatan agar tidak kembali berperang.

⁵⁷ Takashi Inoguchi, "Japan's Ambition for Normal State Hood: A bridged version", diakses dari <http://www.glocom.org> pada 30 Oktober 2014.

Konsekuensi yang diterima oleh Jepang merupakan reaksi dunia karena ketakutan serta traumatik masyarakat dunia terhadap kekejaman dan agresifitas militer Jepang ketika perang maupun pada masa imperialisme Jepang. Tidak hanya mengeruk sumber daya alam, akan tetapi Jepang terkenal dengan pemekerjaan paksa (*romusha*), atau perempuan-perempuan yang dipaksa untuk melayani nafsu para tentara Jepang di tanah jajahan (*jugun ianfu*).

Kebijakan pertahanan Jepang pasca kekalahan dalam Perang Dunia II bertumpu pada kesepakatan antara Amerika Serikat dan Jepang. Fondasi yang amat penting terutama pada perkembangan dan desain politik luar negeri Jepang diperankan oleh Shigeru Yoshida. Shigeru Yoshida adalah salah satu tokoh konservatif Jepang yang disisakan Perang Dunia II. Yoshida adalah Perdana Menteri terlama yang pernah menjabat di Jepang. Budaya Jepang tidak begitu mengenal tokoh-tokoh pahlawannya, akan tetapi Shigeru Yoshida adalah pengecualian. Ia dikenal sebagai pahlawan, sekaligus pemimpin besar yang kuat dan kharismatik.⁵⁸ Yoshida mempunyai karakter yang kuat, selain itu pengalamannya menjadi duta besar di Eropa memberikan pengalaman berharga bagaimana seharusnya berhadapan dengan para pemenang perang terutama Amerika Serikat.

Membangun kembali sebuah negara bangsa yang kalah perang tidaklah mudah. Di masa sulit tersebut prioritas Yoshida adalah pada pengembalian reputasi Jepang serta mendapatkan kembali penerimaan oleh masyarakat

⁵⁸ Kenneth B. Pyle, *Op. Cit.* Hal.226.

internasional. Yoshida harus meyakinkan masyarakat internasional bahwa Jepang telah berubah dan dan berkomitmen untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Selain itu Yoshida menyadari bahwa menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemoni namun tanpa mengorbankan kepentingan Jepang akan membawa dampak positif bagi perkembangan Jepang. Seperti yang ia katakan: *“Just as the United States was once a colony of Great Britain, but it now stronger of the two, if Japan becomes a colony of the United States, it will also eventually stronger.”*⁵⁹

Dengan kata lain, meskipun Jepang haus dikendalikan sedemikian rupa oleh Amerika Serikat pasca kekalahan, namun Yoshida yakin untuk jangka panjang nanti Jepang akan bisa menjadi kuat. Fondasi kebijakan Jepang ini dikenal sebagai Doktrin Yoshida. Dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat pada masalah keamanan, ada tiga pendekatan taktis Yoshida antara lain:

Japan’s economic rehabilitation must be the prime national goal. Political-economic cooperation with the United States was necessary for this purpose.

Japan should remain lightly armed and avoid involvement in international politic-strategic issues. The Self Defense Force would not be the deployed abroad. Japan japan will not participate in collective defense arrangements. Not only would this low military posture free the energies of

⁵⁹ *Ibid*, Hal. 242.

its people for productive development, it would prevent divisive domestic political struggles.

To gain along term guarantee of its own security, Japan would provide bases for US army, navy and air force.⁶⁰

Kebijakan meminimalisir kemampuan militer ini berhasil dalam mensiasati ketakutan internasional dan sebagai nafas baru dalam kehancuran sistem ekonomi di dalam negerinya. Efektifitas Doktrin dalam menyesuaikan dengan masyarakat internasional dan lingkungan politik domestik tersebut memberikan daya tarik kepada para pengganti Yoshida berikutnya. Doktrin Yoshida bertahan cukup lama bahkan melebihi apa yang telah diprediksikan oleh para pengamat. Sebelumnya doktrin ini sempat mendapatkan oposisi dari kelompok kanan dan kaum konservatif.

Doktrin Yoshida adalah sebuah *grand design* yang menjadi acuan bagi para penggantinya. Para penerus Yoshida, seperti Perdana Menteri Ikeda Hayato (1960-1964) dan Sato Eisaku (1964-1972). *Grand design* ini memerlukan penyesuaian struktur internal serta menentukan wajah perekonomian Jepang. Dari sisi struktural, *economical recovery* memerlukan sejumlah lembaga kesertaanya. Sebelum menjabat Perdana Menteri Ikeda Hayato meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam pembangunan ekonomi dengan memperkerjakan tiga lembaga ekonomi terpenting yaitu Kementerian Perdagangan Internasional dan Perindustrian (*Ministry of International Trade and Industry/MITI*), Kementerian Keuangan (*Ministry of*

⁶⁰ *Ibid.*

Finance/MOF) dan Biro Perencanaan Pembangunan. Dengan tiga lembaga ini, Ikeda yang merupakan penasihat ekonomi semasa Yoshida temembuat perencanaan yang sangat berani dengan dengan mematok rpeningkatan pendapatan ekonomi Jepang menjadi dua kali lipat dalam satu dekade.⁶¹

Doktrin Yoshida juga telah mengubah wajah perekonomian Jepang. Para pemimpin era Meiji tidak pernah menerima paradigma ekonomi liberal ala Amerika dan Eropa sebagai sistem yang cocok di Jepang. Meskipun Yoshida adalah pengagum berat strategi para pemimpin Meiji, namun Yoshida mengembangkan modelnya tersendiri. Memang Yoshida sependapat dengan kalangan Meiji bahwa Meiji tidak akan tergantung oleh masuknya modal asing, namun tidak ada salahnya untuk memperkerjakan orang asing untuk menimba ilmu mereka.⁶²

Pemerintah mulai menggerakkan kapitalisme di Jepang dengan memperkuat sektor industri dan membangun infrastruktur seperti pelabuhan dan dermaga, perkapalan, rel kereta api, industri berat seperti baja dan besi. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah melakukan intervensi cukup signifikan dalam perekonomian pasar. Hal ini yang menjadikan Jepang tetap bertahan ketika dunia Barat dilanda *Great Depression*.

Realisme Jepang mengantarkan Jepang pada kebijakan pasifme. Kebijakan luar negeri pasifis Jepang ditandai dengan kebijakan untuk tidak mengambil peran apapun dalam beberapa hal seperti.⁶³

⁶¹ *Ibid.* Hal. 243

⁶² *Ibid.* Hal. 245

⁶³ Thomas L. Wilborn, "Japan's Self Defense Forces: What Danger to Asia?" diakses dari <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdf/files/00099.pdf> pada 15 Desember 2014.

- a. *Never again rely on military instrument as the primary means to achieve desired domestic or international goals.*
- b. *Never again have the homeland experience mass domestic bombing.*
- c. *Never again allow military institution or military officer to exercise a veto on public policy or to confront civilian politicians, bureaucrats, or business leader with life-threatening ultimate or political-military fait accompli.*
- d. *Never again slight the importance of superior technology and the capacity to produce large quantities of advanced weapons with high quality control.*

Ditambahkan oleh Pyle⁶⁴ 7 kebijakan “no” yang dibuahkan oleh Doktrin Yoshida:

1. *No overseas deployment of Japan troops.*
2. *No participation on collective self-defense arrangements.*
3. *No power projection capability.*
4. *No nuclear arms.*
5. *No arms export and no sharing of defense-related technology.*
6. *No more than 1% of GNP for defense expenditure.*
7. *No military use of space.*

Kebijakan ini sangat berlawanan dengan aktifitas Jepang sebelumnya yang menjadi salah satu penentu hubungan antar bangsa. Jepang meminimalisir keikutsertaannya dalam penciptaan keamanan internasional

⁶⁴ Kenneth B. Pyle, “Abe Shinzo and Japan Change of Course”, *NBR Analysis*, Vol. 17. No. 4. Oktober 2006, Hal. 17

dengan tidak lagi terlibat dalam konflik-konflik berskala internasional. Dengan doktrin di atas, Jepang hanya berkonstentrasi pada masalah pemulihan ekonomi dan sosial dalam negeri.

Pasifisme Jepang ini sebenarnya mengandung dua hal penting. Pertama, Jepang tidak diperkenankan memiliki angkatan perang sendiri. Keamanan atas Jepang menjadi tanggung jawab Amerika Serikat. Jika kemudian Jepang diperkenankan memiliki Pasukan Beladiri (*Self Defense Forces*), maka kekuatannya hanya sebatas pada pengamanan dalam negeri dan seluruh pengendalian operasionalnya di bawah kekuasaan sipil. Kedua, pasifisme menuntut Jepang untuk tidak terlibat dalam penataan keamanan dalam berbagai konflik internasional.⁶⁵

A.5. Perkembangan Sistem Pertahanan Jepang Era Shinso Abe

Shinzo Abe adalah Perdana Menteri pertama yang lahir pasca Perang Dunia sekaligus perdana menteri termuda sepanjang sejarah Jepang. Abe yakni representasi kaum muda dan sangat nasionalis. Abe mempunyai dua pijakan mental nasionalisnya. Yaitu, pengaruh kakeknya, Nobusuke Kishi yang mantan Perdana Menteri Jepang 1957-1960, dan sekaligus pernah dipenjara karena dianggap sebagai penjahat perang oleh Tokyo Tribunal. Akan tetapi di mata Abe, Kishi adalah sosok pahlawan. Pijakan Abe yang kedua adalah mentalitas sebagai generasi muda yang tidak ingin melihat Jepang selalu dipersalahkan dalam Perang Dunia.⁶⁶

⁶⁵ Sugeng Riyanto, *Op. Cit.* Hal. 24.

⁶⁶ "Abe Shinzo and Japan Change of Course", *Loc. Cit.*

Perdana Menteri Shinzo Abe mewarisi banyak pekerjaan yang belum selesai pada era Koizumi. Perdana Menteri Shinzo Abe (2006-2007), berusaha memperbaiki ketidak seimbangan antara kekuatan ekonomi dengan perlindungan kepentingan Jepang di luar negeri melalui penguatan dalam diplomasi luar negeri dan militer. Kebijakannya ini akan memuaskan berbagai kalangan di dalam negeri, namun membuat negara lain berharap cemas.

Peran internasional Jepang yang semakin meningkat dalam berbagai sektor, dipahami sebagai isyarat bahwa Jepang harus menjadi negara yang mandiri terutama sekali dalam bidang keamanan. Abe juga menginginkan Jepang sebagai “*normal country*” mempunyai konstitusi tersendiri, mengajarkan patriotisme di sekolah-sekolah, dan memupuk peran keamanan internasional yang lebih tinggi. Singkatnya, Abe mulai menolak pasifisme warisan pendahulunya.

Kembalinya Shinzo Abe sebagai perdana menteri membawa spekulasi bahwa Jepang akan semakin pro-militer. Pada masa pemerintahannya yang pertama di tahun 2006, Abe sempat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bernada kanan, meningkatkan patriotisme, dan cenderung meningkatkan kemampuan militer Jepang. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi salah satu penyebab turunnya popularitas Abe, membawanya turun dari jabatan perdana menteri. Pada masa pemerintahannya yang kedua, bagaimanapun, Abe tetap kembali mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait peningkatan

pertahanan, sesuatu yang sebenarnya telah dicanangkan semenjak terbitnya konsep *Dynamic Defense Force* di tahun 2010.⁶⁷

Namun, berbeda dengan sebelumnya, Abe tetap dapat mempertahankan jabatannya. Hal tersebut dikarenakan Abe memiliki posisi dan legitimasi yang lebih kuat dari sebelumnya, dengan dukungan dari LDP sebagai partai mayoritas yang menguasaiparlemen, dan tingkat penerimaan rakyat yang tetap baik. Kuatnya sumber legitimasi Abe juga disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di Asia Timur yang membuat peningkatan kekuatan militer menjadi lebih mudah diterima. Hal ini juga menyiratkan kemungkinan penerimaan masyarakat Jepang terhadap isu keamanan, termasuk perubahan konstitusi, akan terus bertambah di masa yang akan datang.

Abe, sebagai Perdana Menteri pertama yang lahir setelah Perang Dunia II berusaha memperbaiki ketimpangan tersebut. Bila melihat ke belakang, gagasan membangkitkan kembali kekuatan militer mengalami pasang surut karena tekanan dari dalam maupun negara lain. Shinzo Abe belum melakukan peningkatan postur militer, tetapi ia memulainya dari bagian paling mendasar. Ia mengubah undang-undang Jepang yang mengedepankan perdamaian kearah yang lebih membuka ruang gerak bagi tindakan militer. Ia juga mengubah status instansi militer tertinggi dari tingkat direktur jenderal menjadi kementerian penuh. Dua nilai yang dimiliki Jepang, yaitu

⁶⁷ “Kementrian Pertahanan Jepang Bukanlah Ancaman”, <http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2007/01/16/brk,20070116-91373,id.html> diakses pada 15 Desember 2014.

kerja keras dan patriotisme. Dari sisi Abe, peningkatan postur militer merupakan keharusan karena kepentingan nasional menghendakinya.

Jepang secara kontinyu melakukan perubahan kebijakan pertahanan. Dalam beberapa tahun ini, puncaknya saat parlemen Jepang (Diet) menyetujui usulan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk membentuk Departemen Pertahanan (*Ministry of Defense*) sebagai peningkatan status dari Badan Pertahanan Jepang atau *Japan Defence Agency* dan diwujudkan pada 9 Januari 2007. Sepanjang sejarah pasca-Perang Dunia II sampai sekarang terus berkembang isu kebijakan pertahanan, terutama berkisar pada posisi dan peran Jepang dalam menjaga dan memelihara stabilitas keamanan dikawasan Asia Timur. Pasca disetujuinya pembentukan kementerian pertahanan baru di Jepang, langsung terungkap kritik spontan berbagai pengamat dan elit di kawasan Asia terutama dari Tiongkok, Korea dan beberapa anggota ASEAN yang merasa rasa khawatir akan mencuatnya kembali kebijakan Asia Timur Raya, “visi dan misi” Jepang selama PD II yang membawa kesengsaraan kepada bangsa Asia pada masa perang tersebut.

Dalam beberapa hal yang mendukung perubahan badan keamanan tersebut adalah karena Jepang tidak dapat mengandalkan Amerika Serikat karena Washington memiliki kepentingan berbeda. Misalnya, dalam mendukung pencalonan Jepang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Shinzo Abe mesti melaksanakan kebijakan luar negeri dan pertahanan dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan peningkatan hubungan dengan Washington. Dengan postur yang lebih kuat, ia akan memainkan hubungan

bilateral dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia, tetapi ia tidak dapat meninggalkan persekutuan tradisional dengan Amerika Serikat. Abe bisa jadi lebih maju dari pendahulunya, Junichiro Koizumi (2001-2006) yang dikenal pro Washington. Shinzo Abe mengatakan bahwa negara-negara lain tidak perlu khawatir atas keputusan negerinya meluncurkan secara penuh lembaga kementerian pertahanan sejak Perang Dunia II. “Peningkatan dari badan menjadi kementerian tidak berarti sebuah ekspansi anggaran militer atau kekuatan militer,” kata Abe dalam pidato dalam sebuah kelompok pemikir di Tokyo. Menurut Abe, kementerian pertahanan itu tak berarti ancaman kepada kawasan, “Tapi lebih menunjukkan komitmen kami memberikan kontribusi perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Abe.⁶⁸

Ketika Shinzo Abe sebagai penerus Koizumi, sejak 28 September 2006, mulai bergerak maju, terungkap gaya barunya dalam kancah dunia internasional. Dalam perjalanan sejarah dunia, paling sedikit terdapat tiga pola kokuisaka dalam tahap perkembangan internasional, yakni pola *absorptive-imitative*, pola *hegemonic-proselytic* dan pola *contributive-co-existence*. Pola pertama, *absorptive-imitative*, merupakan pola menyerap-meniru apa saja yang dikembangkan di dunia barat. Pola kedua, *hegemonic-proselytic* (hegemoni-menjajah), yaitu manifestasi kebijakan dunia Barat dari Spanyol sampai Amerika Serikat sebagai akibat fenomena reformasi sosial dan revolusi industri di barat. Sedangkan pola ketiga menggerakkan suatu budaya dan masyarakat madani yang luas.

⁶⁸ “Kementerian Pertahanan Jepang Bukanlah Ancaman”, *Loc. Cit.*

Dengan memfokus pada ketiga pola ini, Jepang makin bergairah untuk muncul dengan suatu kerangka atau formulasi pandangan hidup dengan memiliki cita-cita dapat berperan sebagai kekuatan dunia. Bagi Jepang, semenjak tahun 1990-an berpacu dengan Tiongkok dan India untuk mampu menjadi salah satu negara adi daya, menyimpulkan bahwa kekuatan materiil saja tidaklah cukup. Kehebatan materiil itu harus diperkuat elemen lain, yaitu kultur. Untuk dapat dipahami dan diapresiasi, maka intruduksi kultur dan sikap pandang dunia (*world view*) hanya dapat dikerjakan atas dasar suatu pemahaman yang mendalam. Kultur membentuk sikap pandang tentang dunia.⁶⁹

Shinzo Abe, sebagai pengganti Koizumi, dianggap juga sebagai reformis yang lahir pasca Perang Dunia II. Ia yang lahir pada 1947 dinilai berbagai kalangan sebagai sosok yang memiliki sikap pandang lebih matang sekaligus visioner dalam membangun kemitraan dengan negara-negara Asia Timur. Kesadaran tulusnya, apalagi sejak Undang-Undang Jepang direvisi dengan mengubah Badan Pertahanan Jepang menjadi kementerian penuh. Keputusan itu sangat didukung oleh sikap optimis berbagai kalangan elite muda Jepang. Shinzo Abe menggaris bawahi posisi baru dasar-dasar pembangunan bangsa Jepang secara lebih riil dalam percaturan internasional, dalam politik ekonomi dan budaya untuk berperan serta mewujudkan perdamaian sekaligus stabilitas.⁷⁰

⁶⁹ Bob Widyahartono MA, "Departemen Pertahanan Baru Jepang Dalam Pembaruan 'Kokusaika'", diakses dari <http://www.tribun-timur.com/view.php?id=43674&jenis=Internasional>

⁷⁰ *Ibid*

B. Sistem Pertahanan Jepang

Tabel 2.1

Kronologi Pertahanan Jepang⁷¹

Waktu	Peristiwa Penting
08-07-1950	Jendral McArthur membentuk kembali Kepolisian Nasional
08-09-1951	49 Negara menandatangani Perjanjian Keamanan dengan Jepang
01-08-1952	Badan Keamanan Nasional dibentuk
01-08-1952	Studi Keamanan Nasional dibentuk
01-08-1952	Institut Penelitian dan Pengembangan dibentuk
15-10-1952	Pasukan Keamanan Nasional disahkan
01-04-1953	Akademi Keamanan Nasional
01-07-1954	ASDF, MASF, GSDF disahkan
01-07-1954	Kantor Pusat Perbekalan dibentuk
01-11-1962	Badan Administrasi Pertahanan dibentuk
25-04-1974	Sekolah Medis Pertahanan dibentuk
20-01-1997	Kantor Pusat Inteljien dibentuk
08-05-2000	Badan Pertahanan dipindah ke gedung Ichigaya
09-01-2007	Perubahan Badan Pertahanan ke Departemen Pertahanan

⁷¹<http://www.mod.go.jp/e/about/index.html>_diakses pada 05 Januari 2015.

B.1. Konstitusi Jepang

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, kebijakan pertahanan Jepang didasarkan pada dua konstitusi pokok yaitu; pasal 9 konstitusi 1947 dan perjanjian pertahanan yang disepakati oleh AS-Jepang. Penandatanganan perjanjian AS-Jepang di San Fransisko pada 8 september 1951 yang berlaku pada 28 april 1952 menjadikan Jepang negara yang bergantung kepada AS dalam hal keamanan. Jepang menerapkan sikap diplomasi yang damai, *non assertive*, dan *low-key*. Sepanjang tahun 1950-1960 kebijakan luar negeri Jepang didasarkan pada tiga prinsip dasar yaitu, kerjasama dengan AS dengan alasan keamanan dan ekonomi, promosi sistem kerjasama perdagangan bebas yang baik demi kepentingan pemenuhan kebutuhan Jepang, dan kerjasama internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁷²

Dasar konstitusi pertahanan pemerintahan Jepang pasca perang adalah UU pasifis yang dirancang untuk menggantikan Konstitusi Meiji oleh pasukan pendudukan SCAP yang dipimpin oleh McArthur. Secara lengkap pasal yang dipergunakan sebagai dasar pertahanan Jepang tersebut adalah sebagai berikut;

- 1. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use force as means of settling international disputes.*

⁷² "Foreign Policy of Japan", diperoleh dari <http://en.wikipedia.org/wiki/foreignpolicyofJapan>, diakses pada 05 Januari 2015.

2. *In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential will never maintained. The right of belligerency of the states will not be recognized.*⁷³

Jika melihat pasal 9 konstitusi Jepang, maka seharusnya Jepang tidak diperbolehkan memiliki kekuatan militer bersenjata entah apapun namanya seperti yang ditegaskan dalam pasal 9 ayat 2. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan dan perubahan situasi internasional, interpretasi yang digunakan oleh pemerintah dan politisi Jepang justru diperluas pada pasal 9 ayat 1, yang menyatakan bahwa Jepang sangat menginginkan perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban.

Hal ini berarti Jepang harus aktif memenuhi tanggung jawabnya dengan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Satu-satunya penggunaan kekuatan militer di luar negeri yang diperbolehkan bagi bangsa Jepang dan dimungkinkan dalam konstitusi ini adalah aktifitas pemeliharaan perdamaian yang berlangsung dibawah PBB. Penekanan pada kalimat terakhir ini adalah penting dan harus mendapat perbedaan yang tegas, yaitu antara aksi sebagai sebuah bangsa berdaulat atau berdasarkan pada keputusan pemerintah Jepang sendiri dengan aksi dibawah bendera komando PBB.

Meskipun kekuatan beladiri Jepang telah dibentuk sejak tahun 1954, namun perdebatan mengenai hak kekuatan pertahanan seolah tidak pernah habis. Latar belakang dari pokok perdebatan adalah interpretasi dari pasal 9. Yang

⁷³ <http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html> diakses pada 05 Januari 2015.

menjadi dasar dari kebijakan pertahanan Jepang. Poin-poin perdebatan tersebut antara lain:

- a. Tingkat kebutuhan minimum; dimana Jepang hanya diijinkan untuk memiliki kemampuan bela diri yang dibatasi pada tingkat kebutuhan minimum.
- b. Kondisi-kondisi bagi hak penggunaan kekuatan bela diri; penggunaan kekuatan bersenjata menyangkut hak hanya diijinkan pada kondisi-kondisi terbatas seperti melawan agresi yang terjadi.

Alasan pertama landasan kebijakan pertahanan Jepang adalah untuk mempertahankan diri dari ancaman yang dapat mengganggu Jepang dan meminimalisasi kerusakan jika sampai terjadi potensi konflik. Kedua adalah untuk mengurangi dan mencegah potensi ancaman terhadap Jepang dalam berbagai bidang yang muncul di dunia internasional.⁷⁴

Langkah-langkah yang dilakukan Jepang adalah memperkuat kerjasama dengan Amerika Serikat sebagai sekutu utama dan negara-negara lain di dunia internasional. Untuk mewujudkan tujuan dari alasan tersebut, Jepang menempuh langkah diplomatis untuk mendukung kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, menggunakan hubungan yang kooperatif dengan negara lain, menggunakan diplomasi bantuan finansial (*Official Development Assistance / ODA*), memperkuat hubungan AS-Jepang berdasarkan perjanjian keamanan, membangun basis keamanan nasional

⁷⁴“ National Defense Program Guideline for FY 2005 and After”. Diakses dari http://www.mod.go.jp/e/index_.htm

untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri dan membangun pasukan pertahanan yang efisien.⁷⁵

Sebagai tambahan, pemerintah Jepang menyusun seperangkat dasar kebijakan nasional yang merupakan turunan dan interpretasi pasal 9, antara lain⁷⁶:

a. Exclusively Defense-Oriented Policy

Kekuatan pertahanan harus tetap bersifat defensif, dan hanya digunakan jika terjadi suatu serangan bersenjata yang berbahaya dari negara lain atas Jepang. Kekuatan yang dimiliki Jepang harus dipergunakan pada batas kebutuhan minimum untuk mempertahankan diri.

b. Not Becoming a Military Power

Jepang tidak akan menjadi kekuatan militer yang akan menjadi ancaman negara lain, selain itu Jepang tidak akan memiliki kekuatan militer dan ditambahkan dengan ketentuan tingkat kebutuhan minimum. Jepang menganut konstitusi pasifisme dan tetap menjadi negara cinta damai “*peacefull country*”.

c. Three Non-Nuclear Principles

Tiga prinsip non-nuklir adalah tidak memiliki, tidak memproduksi dan tidak menyimpan senjata nuklir di Jepang. Sebagai negara maju, Jepang dapat saja memiliki senjata nuklir dalam waktu singkat karena sudah memiliki teknologinya. Prinsip-prinsip ini pertama kali dicetuskan oleh Perdana Menteri Eisaku Sato di tahun 1967 dan disetujui melalui Resolusi

⁷⁵ *Ibid*, hal.4

⁷⁶ <http://www.mod.go.jp/e/index.htm> diakses pada 05 Januari 2015.

Majelis Rendah pada tahun 1971. Untuk menjaga dan meminimalkan ancaman senjata nuklir, Jepang akan terus berlindung pada payung nuklir Amerika Serikat, dan pada saat yang sama aktif dalam non-proliferasi dan pelucutan senjata nuklir.

Tiga prinsip non-nuklir tersebut juga dijadikan Jepang sebagai ketetapan kebijakan nasionalnya. Selain itu Jepang melarang memproduksi dan mengembangkan senjata nuklir dibawah *Atomic Energy Basic Law*. Sebagai tambahan, Jepang melakukan ratifikasi perjanjian non-proliferasi nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty / NNPT*) dan tidak akan menjadi negara nuklir ataupun berkeinginan menggunakannya.

d. Three Principles on Arms Exports

Tiga prinsip atas kontrol senjata diumumkan pada sesi pertemuan komite audit parlemen tanggal 21 April 1967 yang juga di deklarasikan oleh PM Eisaku Sato. Prinsip ini melarang ekspor senjata kepada negara-negara berikut, yaitu; negara negara komunis, negara-negara yang dikenai embargo senjata melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, dan negara-negara yang terlibat atau diduga akan terlibat konflik internasional. Sebagai tambahan, pemerintah mengumumkan pedoman kebijakan yang serupa pada tahun 1976 menyatakan bahwa Jepang tidak akan mengembangkan ekspor senjata, dengan negara tujuan manapun. Untuk melakukan ekspor senjata memerlukan ijin dari instansi kementerian ekonomi, perdagangan dan

industri yang mengacu pada peraturan pertukaran dan perdagangan luar negeri dan peraturan pengawasan perdagangan senjata.⁷⁷

e. *Civilian Control*

Disamping hal-hal diatas masih terdapat satu dasar kebijakan pertahanan Jepang yaitu kontrol sipil atas kekuatan pertahanan dan militer. Dalam hal ini dapat dilihat melalui struktur organisasi Departemen Pertahanan (*Minister of Defense*) yang dikepalai oleh seorang menteri dari kalangan sipil. Kementerian tersebut berada dalam kabinet yang juga di pimpin oleh seorang Perdana Menteri, dan sesuai dengan Konstitusi 1947 pasal 66, seorang Perdana Menteri dan menteriharus dari kalangan sipil.⁷⁸

B.2. *Japan Self Defense Forces (JSDF)*

Setelah diberlakukannya konstitusi 1947, Amerika Serikat mempunyai tanggung jawab atas pertahanan dan keamanan Jepang. Kerja sama Amerika Serikat-Jepang dalam bidang kemanan ini berjalan cukup pelan. Pada masa-masa awal pendudukan, Amerika Serikat berkeinginan agar Jepang untuk memiliki tentara sebagai pertahanan diri (*Self Defence Forces*) di samping tetap menjunjung tinggi pasal 9 konstitusi juga untuk bersikap anti perang.

Self Defence Force (SDF) Jepang berasal dari *National Police Reserve (Keisatsu Yobi-tai)* yang didirikan pada tahun 1950. Setelah mengalami pergantian nama menjadi *Safety Force (Hoantai)* pada tahun 1952, SDF secara resmi diakui pada tahun 1945 pada saat yang sama *Diet* Jepang menyetujui pendirian *Japan Defense Agency (JDA)* atau Badan Pertahanan Jepang dan

⁷⁷ Referensi hal. 557 http://www.mod.go.jp/e/pub/lw_paper/index.html diakses pada 05 Januari 2015.

⁷⁸ Secara lebih spesifik pasal 66 ayat 2 berbunyi “The Prime Minister and Ministers of State must be civilians”. <http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html>

SDF.⁷⁹ Badan Pertahanan Jepang menginginkan bahwa kemampuan SDF harus mempunyai kemampuan dan mampu memenuhi tuntutan untuk melindungi wilayah Jepang dari serangan atau ancaman. *National Program Defense Outline* (NDPO) 1976 mendefinisikan bahwa peraturan SDF hanya berfungsi sebagai pertahanan terbatas dalam menghadapi serangan samapai Amerika datang memberi bantuan kepada Jepang. Menurut undang-undang SDF pasal 3, fungsi SDF adalah:

*“to defend the nation against direct and indirect aggression in order to maintain Japan’s peace and security and, if necessary, to take charge of maintaining public order”*⁸⁰

Japan’s Self Defense Forces adalah tentara militer Jepang yang dibentuk setelah perang dunia kedua sebagai kompensasi bagi Jepang agar bisa memiliki pertahanan militer sendiri meskipun dunia internasionalbertanggung jawab atas keamanan Jepang.

Peraturan umum Jepang dalam hal pertahanan dan keamanan nasional menetapkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan fungsi Self Defense Force (SDF):⁸¹

1. Memelihara seluruh kebijakan eksklusif yang berorientasi dibidang pertahanan.
2. Berusaha mencegah untuk menjadi sebuah kekuatan militer yang bisa mengancam keamanan dunia.

⁷⁹ “Japan Defense Agency Establishment LAW 9 Juni 1954”, <http://www.law.e-gov.go.jp/hymldata/S29/S29HO164.htm> diakses pada 18 Januari 2015.

⁸⁰ “SDF Law, Article Three”. <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html> diakses pada 18 Januari 2015.

⁸¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Self-Defense_Forces diakses pada 18 Januari 2015.

3. Berusaha untuk tidak terlibat dalam usaha pengembangan senjata nuklir dan menolak untuk memperbolehkan penggunaan senjata nuklir dalam teritorial Jepang.
4. Menjamin adanya kendali sipil dalam militer.
5. Memelihara pengaturan keamanan dengan Amerika Serikat.
6. Membangun kemampuan pertahanan dalam batasan yang secukupnya.

Krisis Teluk tahun 1990-an menyadarkan bangsa Jepang untuk turut andil mengambil peran dalam bidang keamanan internasional. Masyarakat internasional mengkritik kelambanan pemerintah Jepang dalam menawarkan bantuan yang terlalu sedikit melawan agresi Irak ke negara tetangganya.

Kesadaran itu diwujudkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1990 dengan membuat kerangka hukum (*legal framework*) sehingga SDF dapat mengambil peran dalam dunia internasional, termasuk dalam operasi perdamaian. Rancangan undang-undang ini menjadi fokus perdebatan di parlemen Jepang, isu perdebatan adalah apakah kapasitas SDF memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pasukan multinasional tanpa perintah PBB meskipun hanya terbatas di bidang logistik. Namun rancangan undang-undang tersebut gagal karena kurang dukungan di parlemen.

Pada bulan September 1991, pemerintah Jepang memperkenalkan rancangan undang-undang baru yang mengizinkan *Self Defense Forces* untuk dikirim keluar negeri dalam misi operasi kemanusiaan di bawah perintah atau asaz izin PBB.⁸² Pada tahun 1992, Diet menyetujui sebuah undang-undang dari

⁸² <http://www.mofa.go.jp/policy/un/pko/issues.html> diakses pada 18 Januari 2015.

PBB yaitu UN Peacekeeping Cooperation Law yang mengizinkan SDF untuk mengambil peran dalam misi pasukan perdamaian. SF akan membantu para petugas PBB dalam beberapa hal, seperti medis, pemulangan kembali para pengungsi, bantuan logistik, rekonstruksi infrastuktur, pemantauan pemilu dan operasi penertiban dengan persyaratan yang sangat ketat.

Pada bulan Mei 1993, 53 anggota SDF dikirim ke Mozambique untuk mengikuti misi pasukan perdamaian PBB, sebelumnya pada tahun 1991 SDF memberikan kontribusi pada Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (UNTAC) bersamaan dengan usaha diplomatik Jepang dalam pelaksanaan persetujuan damai Paris (*Paris Peace Acoord*).⁸³

Perdana Menteri yang menjabat pada saat Junichiro Koizumi dan kabinetnya, Jepang telah melakukan aktivitas dukungan kepada Amerika Serikat dengan mengirim SDF ke Afghanistan dan Iraq. Karena alasan tersebut, pemerintah Jepang membuat Undang-Undang Khusus, *The Anti Terrorism Special Measures Law*⁸⁴ di bulan November tahun 2001 dan *The Iraq Special Measures Law*⁸⁵ di bulan Agustus tahun 2003 yang memungkinkan SDF ikut serta dalam misi pertempuran dan menyediakan dukungan logistik bagi kekuatan Amerika Serikat dalam perang melawan teror tersebut. Jepang mulai mengarahkan tujuan politik luar negerinya pada pencapaian peran sebagai “pemain global”. Jepang mulai menunjukkan langkahnya mendukung

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Pada tanggal November 2001, Jepang mengeluarkan UU Khusus Anti Terorisme yang mengatur bahwa Jepang dapat memberikan kontribusi secara aktif dan dengan inisiatif sendiri terhadap upaya-upaya internasional dalam pencegahan dan pemusnahan terorisme

⁸⁵ “Iraku Jindo Fukko Shien Tokuso Ho” (Special Measures Law Regarding Humanitarian Reconstruction Assistance Activities and the Activities to Support Ensuring Safety). <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO137.html>. diakses pada 18 Januari 2015.

perdamaian dunia melalui aspek diluar bantuan ekonomi dengan keikut-sertaan militer dalam operasi internasional.

B.3. *Ground Self Defense Forces (GSDF)*

JGSDF atau Kekuatan Bela Diri Angkatan Darat Jepang berfungsi menjaga kemanan wilayah Jepang saat dibutuhkan mengingat wilayah Jepang yang berdekatan dengan negara tetangga. Kekuatan ASDF dan MSDF tentunya tidak akan mampu mengusir seluruh agresor dilaut dan diudara pada saat terjadi agresi. Karena itu kekuatan GSDF diperlukan untuk mengamankan lokasi yang dijadikan pendaratan kekuatan musuh.

Personil kekuatan Bela Diri Angkatan Darat (GSDF), pada awalnya berjumlah 75.000 personel, namun secara berangsur-angsur ditingkatkan. Tetapi berdasarkan NDPO yang ditetapkan pada Desember 1995 jumlah personel menjadi 160.000 personel yang terdiri dari 15.000 pasukan cadangan dan 145.000 pasukan reguler. Didalam GSDF terdapat lima angkatan perang, 13 divisi dan dua brigade kombinasi. Pada NDPG 2005, personel kembali mengalami perampingan untuk mencapai tujuan yang efektif, fleksibel, dan kemampuan intelijen yang baik.

Lima divisi, satu kesatuan dan dua brigade kombinasi akan di tata ulang untuk perang terbatas dan peralatan artileri utama dan peningkatan kesiapsiagaan. Satu divisi dan dua kombinasi pasukan akan dilebur menjadi satu kesatuan. Satuan Siap-Siaga Pusat akan diperbaharui untuk mengkontrol dan mengoperasikan kedua unit operasi yang aktif, dan kesatuan khusus seperti kelompok operasi khusus dan unit pertahanan kimia.

Persenjataan yang dimiliki GSDF berupa; tank menengah, *reconnaissance vehicles*, kendaraan pengangkut lapis baja, *towed howitzers*, *self-propelled howitzers*, mortir, *single rocket launchers*, pelontar roket multifungsi, senjata pertahanan udara, rudal *surface-to-surface*, *fixed wing aircraft*, helikopter tempur dan helikopter transportasi.

B.4. Air Self Defense Force (ASDF)

JASDF atau Kekuatan Bela Diri Angkatan Udara mempertahankan Jepang dari invasi pesawat terbang musuh dan rudal yang didasarkan orientasi pertahanan semata. ASDF diharapkan mampu mendeteksi penyerbuan pesawat terbang dan rudal secepat mungkin dan menghancurkannya sejauh mungkin dari Jepang. Untuk itu ASDF perlu memiliki kemampuan untuk pengawasan, kewaspadaan, dan kemampuan untuk melakukan serangan balasan yang cepat terhadap pesawat dan rudal musuh.

Unit kontrol dan peringatan udara akan ditata ulang, dan skuadron pengendali dan peringatan udara akan diisi oleh dua korps Angkatan Udara (satu korps udara menerbangkan pesawat kontrol dan peringatan dini E-767 dan korps yang lain menerbangkan pesawat peringatan dini E-2C). Sedangkan unit pesawat transportasi dan pesawat pengisian di udara akan diperbaharui sementara pesawat transportasi dan pengisian di udara KC-767 akan di non-aktifkan.

Secara umum peralatan yang dimiliki antara lain, *ground attack aircraft*, pesawat tempur, *reconnaissance aircraft*, *airborne early warning aircraft*,

pesawat transportasi, peluru darat ke udara, peluru udara ke laut, peluru udara ke udara dan pengendalian pertahanan udara.

B.5. *Maritime Self Defense Force (MSDF)*

Pasukan Bela Diri Angkatan Laut Jepang merupakan pasukan maritim yang sangat tangguh di Asia, berdampingan dengan ketujuh kapal perang AS, dengan peralatan yang canggih seperti kapal pengawas dan kapal *Anti-Submarine Warfare (ASW)* yang besar. Dua macam operasi yang diselenggarakan oleh MSDF untuk kepentingan pertahanan yaitu pengamanan lalu lintas dan pengamanan wilayah Jepang karena Jepang bersandar pada pasokan sebagian besar bahan makanan dan energi dari negara-negara lain, sehingga jika hal ini diputus, maka akan menjadi masalah yang sangat serius bagi kehidupan nasional Jepang, dapat juga dikatakan bahwa Jepang sangat terpengaruh oleh dampak ekonomi dunia.

Oleh karena MSDF harus mampu menjamin keamanan lalu lintas dari serangan kapal selam musuh, pesawat terbang atau kapal musuh jenis lainnya, dengan mengefektifkan operasi pengawasan, pertahanan dan pengamanan pelabuhan. Untuk mengaplikasikan tujuan tersebut dan mengamankan transportasi laut Jepang. MSDF melakukan langkah penyebaran dua kapal selam yang diletakkan pada tiga selat utama yaitu; Selat Soya, Selat Tsugaru, dan Selat Tsushima jika diperlukan. Untuk operasi ini Jepang memelihara 16 kapal selam dengan enam divisi.

Pada NDPG 2005, Jepang memiliki unit patroli pesawat terbang yang berpangkalan sebanyak 13 skuadron, yang terdiri dari delapan *fixed-wing patrol*

aircraft units yang bertugas mengawasi laut lepas, termasuk wilayah diluar Jepang yang diutamakan untuk misi anti-kapal selam, dan lima landasan helikopter patroli yang berfungsi sebagai pengamanan selat dan pelabuhan. Secara keseluruhan MSDF memiliki peralatan militer seperti; kapal selam disel, peluru kendali, kapal patrol dan pesisir, kapal pembantu, serta pesawat dan helikopter.

Berikut adalah tabel jumlah personil SDF:⁸⁶

Tabel 2.2

Jumlah Personil SDF 2013-2014

● Changes in number of SDF personnel, etc. (Unit : Person)

	End of FY2013	End of FY2014	Increase/ Decrease
GSDF	159,238	159,198	△40
Regular personnel	151,063	151,023	△40
Ready reserve personnel	8,175	8,175	0
MSDF	45,517	45,494	△23
ASDF	47,097	47,073	△24
Joint Units	1,227	1,253	26
Joint Staff	361	367	6
Defense Intelligence Headquarters	1,907	1,910	3
Internal Bureaus	—	40	40
Total	247,172	247,160	△12
	(255,347)	(255,335)	(△12)

Transfer to Joint Staff Office etc.

Note 1: Figures for the end of each fiscal year are budget figures

Note 2: The number in the parentheses includes the number of SDF ready reserve personnel.

Note 3: 20 out of 40 decreases in GSDF represents the status change from SDF personnel to nursing students.

⁸⁶ Defens Programs and Budget of Japan - Overview of FY 2014 Budget, http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/260130.pdf diakses pada 18 April 2015.

Tabel 2.3.1

Jumlah Personil SDF 2014-2015

● Changes in number of SDF personnel, etc				(Unit: Person)
	End of FY2014	End of FY2015	Increase/Decrease	
GSDF	159,198	158,938	△260	
Regular personnel	151,023	150,863	△160	
Ready reserve personnel	8,175	8,075	△100	
MSDF	45,494	45,364	△130	
ASDF	47,073	46,940	△133	
Joint Units	1,253	1,253	0	
Joint Staff Office	367	368	1	
Defense Intelligence Headquarters	1,910	1,911	1	
Internal Bureau	40	48	8	
Defense Equipment Acquisition Agency (provisional)	—	407	407	
Total	247,160	247,154	△6	
	(255,335)	(255,229)	(△106)	

Note 1: Figures for the end of each fiscal year are budget figures

Note 2: The number in the parentheses includes the number of SDF ready reserve personnel.

Tabel 2.3.2

Tabel Perkiraan Jumlah Personil SDF pada 2015⁸⁷

● Number of SDF personnel (annual average)				(Unit: Person)
	GSDF	MSDF	ASDF	
Annual average	140,049	42,035	43,293	

● Number of SDF reserve personnel					(Unit: Person)
	GSDF	MSDF	ASDF	Total	
SDF reserve personnel	46,000	1,100	800	47,900	

● Number of candidates for GSDF reserve personnel				(Unit: Person)
	End of FY2013	End of FY2014	Increase/Decrease	
SDF reserve candidates	4,600	4,600	0	

● Change in the quota of administrative officials, etc.				(Unit: Person)
	FY2013	FY2014	Remarks	
Increase	316	216		
Quota Rationalization	▲595	▲347		
Transfer to other organizations etc.	▲1	▲21		
Total	▲280	▲152		
Quota at the end FY	21,435	21,283		

Note : Including the Minister, Parliamentary Senior Vice-Minister, two Parliamentary Vice-Ministers, and Special Advisor to the Minister(newly established)

⁸⁷ “Defens Programs and Budget of Japan - Overview FY 2015 Budget”
http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/270414.pdf diakses pada 18 April 2015

Tabel 2.3.1

Jumlah Perkiraan Personil SDF 2015

● Number of SDF personnel (annual average) (Unit: Person)				
	GSDF	MSDF	ASDF	
Annual average	139,906	42,013	43,254	
● Number of SDF reserve personnel (Unit: Person)				
	GSDF	MSDF	ASDF	Total
SDF reserve personnel	46,000	1,100	800	47,900
● Number of candidates for GSDF reserve personnel (Unit: Person)				
	End of FY2014	End of FY2015	Increase/Decrease	
SDF reserve candidates	4,600	4,600	0	
Note: The number of candidates for MSDF reserve personnel introduced with utilization of private marine transport capacity in mind is to be determined.				
● Change in number of administrative officials, etc. (Unit: Person)				
	FY2014	FY2015	Remarks	
Increase	216	160 (848)		
Rationalization	△368	△277 (△848)		
Total	△152	117		
Number at the end of FY	21,283	21,166		

Note 1: Including the Minister, State Minister, two Parliamentary Vice-Ministers, and Senior Advisor to the Minister

Note 2: figures in parentheses in "Increase" "Rationalization" of FY2015 are not included in the total figure related to operational reform.

B.6. *National Defense Program Guidelines (NDPG)*

Pada tahun 2005 Jepang mengeluarkan NPDG (*National Program Defense Guideline*) sebagai ganti dari NPDO⁸⁸ (*National Program Defense Outline*) yang dibuat pada tahun 1957 dan direvisi pada tahun 1996 karena tuntutan perubahan dinamika pertahanan dan keamanan negara dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional pasca Perang Dingin.

Kebijakan pertahanan Jepang berdasarkan NDPO 1996 berupa peningkatan kemampuan pertahanan Jepang sendiri sambil melakukan aliansi keamanan Jepang-AS dan mulai berkontribusi dalam kegiatan internasional

⁸⁸ Jepang mengubah kata *Outline* dengan *Guideline* pada NPDG 2005 yang sebelumnya dengan NPDO 1995, namun dalam bahasa Jepang tetap menggunakan "*Boueikeikakuno Taikou*" diakses dari <http://www.jda.go.jp/j/library/archives/it/index.html> diakses pada 05 Februari 2015.

dalam kerangka pengaturan keamanan Jepang-AS. Pada NDPO tahun 1996 dikatakan bahawa doktrin pertahanan Jepang adalah konsep kekuatan pertahanan standar dan menekankan pada pencegahan.

Sebagai pedoman pada masa transisi, NDPO disusun ketika Jepang masih mencermati model penataan kewanaman regional yang sedang berlangsung. Namun, sejak dikeluarkannya NDPO 1996, situasi keamanan di Asia Timur senantiasa berubah dengan cepat. Perkembangan mencolok terlihat pada meningkatnya dua kekuatan Korea Utara dan Tiongkok. Korea Utara sukses mengembangkan tenaga nuklir sedangkan Tiongkok di sisi yang lain memodernisasi angkatan perangnya dengan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Satu hal yang tidak dapat disisihkan begitu saja yaitu mengenai isu terorisme yang dapat muncul sewaktu-waktu khususnya pasca peledakan *World Trade Center* pada 11 September 2001.

Konsep tersebut direvisi kembali oleh departemen kewanaman dan kabinet dalam NDPG tahun 2005, yaitu konsep strategi keamanan dan pertahanan Jepang yang bersifat multi fungsi, fleksibel, efektif, dan menekankan pada respon, keamanan yang terintegrasi yang mengkombinasikan upaya Jepang secara mandiri, pengaturan keamanan Jepang-AS dan kemampuan intelijen, serta pengembangan dalam mengoptimalkan sumber daya alam serta mengembangkan sistem pertahanan rudal balistik.

Orientasi kekuatan pertahanan Jepang mengalami perubahan, dari semula bersifat *deterrent effect-oriented* menjadi *response capability-oriented*. Dengan kata lain, Jepang akan ikut berperan aktif dalam berbagai aktivitas pemeliharaan

perdamaian internasional. Sebagai bagian integral modernisasi pertahanannya, Jepang akan menyederhanakan struktur kekuatan pertahanan menjadi *a multifunctional, flexible and effective force*, siap menghadapi ancaman senjata nuklir, kimia, dan biologi.⁸⁹

Peluncuran NDPG 2005 disusun sebagai refleksi atas perkembangan situasi keamanan internasional sebelumnya. NDPG 2005 dapat dikatakan sebagai tonggak perubahan signifikan dalam kebijakan pertahanan Jepang dan pertama kalinya secara resmi Jepang menyebut Tiongkok dan Korea Utara sebagai salah satu ancaman nyata terhadap keamanan Jepang:

North Korea is engaged in the development, development and proliferation of weapon of mass destruction and ballistic missiles, and maintains a large number of special operations forces. Such military activities by North Korea constitute a major destabilizing to the regional and international security and are serious challenge to interntaional non proliferation efforts.

*China, which has a major impact on regional security, continues to modernize its nuclear forces and missile capabilities as well as its naval and air forces. China is also expanding its area of operations at sea. We will have to remain attentive to its future actions.*⁹⁰

NDPG ini juga memuat garis-garis besar bagaimana Jepang harus menghadapi ancaman yang muncul tersebut antara lain dengan:

1. Memperkuat aliansi Amerika Serikat – Jepang

⁸⁹ Shinichi Ogawa, "TMD AND Northeast Asian Security", *National Institute For Defense Studies (NIDS)*, Japan 2000, hal 4.

⁹⁰ "National Defense Program Guidelines 2005" diakses dari http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/2004/12/1210taikou_e.html diakses pada 05 Februari 2015.

2. Bekerjasama dengan komunitas internasional, terutama sekali dengan negara-negara yang tergabung dalam skema ODA (*Official Development Assistant*)
3. Meningkatkan kemampuan *Japan's Defense Forces*.

Dalam kurun waktu kedepan, Postur JSDF dirancang untuk: Respon yang efektif terhadap ancaman baru dan situasi yang bervariasi, antara lain:

- Respon terhadap serangan rudal balistik
- Respon terhadap ancaman gerilya
- Respon terhadap invasi lepas pantai Jepang
- Patroli Air dan Udara untuk menghadapi kemungkinan intrusi kekuatan luar yang mungkin masuk ke wilayah udara dan perairan Jepang
- Persiapan menghadapi invasi
- Upaya pro-aktif untuk memperbaiki lingkungan keamanan internasional⁹¹

Dalam NDPG tahun 2005 Jepang memaparkan kondisi yang ada dalam lingkup keamanan lingkungan di luar Jepang. Pandangan Jepang bahwa untuk menghadapi interdependensi yang meningkat dan pertumbuhan globalisasi, masyarakat internasional menghadapi ancaman baru dan situasi yang beragam berhubungan dengan perdamaian dan keamanan, termasuk proliferasi senjata pemusnah massal, misil balistik, dan juga aktivitas terorisme internasional. Karena itu, menurut pengambil kebijakan Jepang bentuk *deterrence* konvensional sudah tidak tepat lagi diterapkan dalam lingkungan dunia dengan

⁹¹ Sugeng Riyanto, *Op. Cit.* Hal. 64.

tantangan ancaman yang makin beragam, terutama ancaman organisasi teroris internasional yang tidak mempertimbangkan perlindungan pada negara, terutama pada warga negara negara yang bersangkutan.

Sepuluh tahun setelah berakhirnya Perang Dingin, kerjasama dan interdependen antar negara-negara besar makin tinggi. Penggunaan kekuatan militer memainkan peran yang lebih besar dalam masyarakat internasional, lebih dari sekedar deterring atau respon terhadap konflik senjata. Jepang memandang adanya indikasi dari negara-negara di sekitar untuk mengembangkan pertahanan negara mereka. Selain itu, Jepang juga melihat kekuatan militer sebagai alat yang juga digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pencegahan konflik atau untuk bantuan kemanusiaan.

B.7. *Ministry of Defense (MOD)*

Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 9 ayat 2 maka seharusnya Jepang tidak diperbolehkan memiliki kekuatan militer bersenjata entah apapun namanya. Pasukan Jepang juga tidak boleh terlibat dalam sengketa internasional. Untuk mengurus pertahanannya, pada tahun 1954, Jepang mendirikan Badan Pertahanan (*Security Council*) yang berada di bawah Kantor Kabinet.

Tahun 2006 Perdana Menteri Shinzo Abe memprioritaskan perubahan dan berupaya meningkatkan status Badan Pertahanan menjadi sebuah kementerian penuh. Pada Desember 2006, parlemen Jepang menyetujui dan tidak ada penentangan berarti. Bahkan, partai-partai oposisi mendukungnya. Pada 9 Januari 2007, Badan Pertahanan Jepang secara resmi berdiri menjadi Departemen Pertahanan yang memiliki kekuatan lebih besar karena berhak

merencanakan anggaran sendiri dan mengajukan rancangan undang-undang. Tidak seperti Badan Pertahanan, Kementerian Pertahanan juga dapat menentukan kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang.

Peresmian kementerian baru berlangsung dalam sebuah upacara dan dihadiri perdana menteri dan menteri pertahanan yang pertama serta sejumlah perwakilan militer dari 22 negara termasuk Amerika Serikat.⁹²

Peningkatan status Badan Pertahanan mencerminkan adanya keinginan Jepang untuk memainkan peran lebih besar dalam mengatasi ancaman di kawasan, terutama dari Korea Utara.⁹³

Jika dibandingkan dengan dasar kebijakan yang dikeluarkan pada 20 Mei 1957 tentang kebijakan dasar pertahanan nasional, akan terlihat bahwa kebijakan pertahanan yang dikeluarkan Jepang pasca Perang Dingin (2007) mengarah pada pengembangan sistem pertahanan.

Tampak bahwa pada masa sebelumnya Jepang terikat dengan prinsip Pasifis, sehingga kecenderungannya adalah menjadi negara yang 'aman'. Dengan perkembangan yang terjadi dari kebijakan luar negeri Jepang di bidang pertahanan yang dituangkan dalam Buku Putih Pertahanan Jepang, secara implisit Jepang menyiapkan diri jika sewaktu-waktu ada ancaman datang dengan meningkatkan kekuatannya. Jepang berusaha menampilkan bahwa negaranya hanya ingin menjadi negara 'normal' dan tidak ingin menjadi ancaman dan bahwa kebijakan untuk mengubah postur pertahanannya hanyalah formalitas yang juga dilakukan oleh negara-negara lain.

⁹² http://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pertahanan_Jepang. diakses pada 05 Februari 2015.

⁹³ *Ibid.*

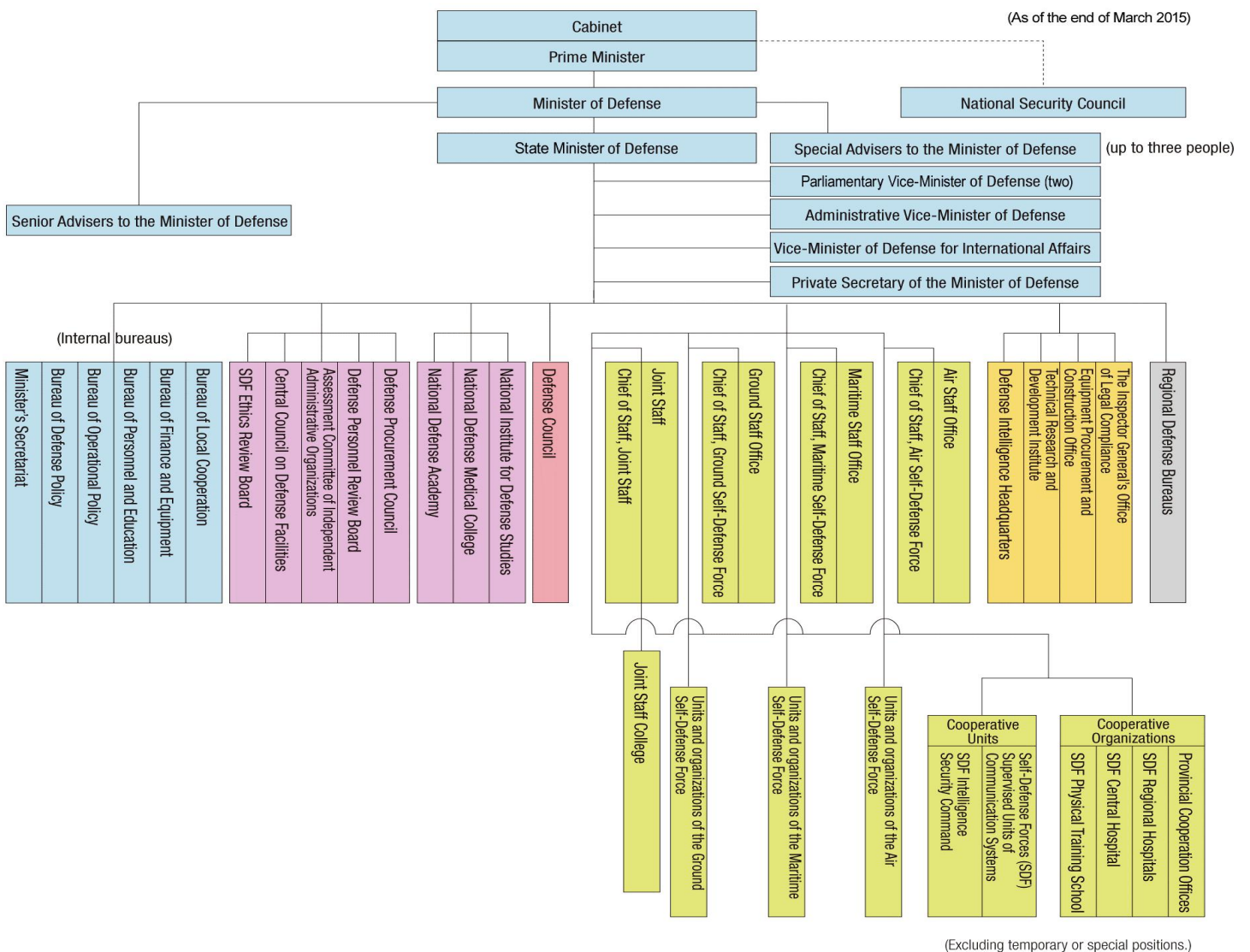
Berikut ini adalah bagan dari kepengurusan Departemen Pertahanan

Jepang:

Bagan 2.1

Kepengurusan Departemen Pertahanan Jepang⁹⁴

Organizational Chart of the Ministry of Defense



B.8. Profil Umum Kekuatan Militer Jepang

⁹⁴ http://www.mod.go.jp/e/about/organization/chart_a.html, diakses pada 05 Februari 2015.

Tabel 2.4

Kekuatan Militer Jepang tahun 2014.⁹⁵

Manpower	Total Population: 127,103,388 Available Manpower: 53,608,446 Fit for Service: 43, 930,753 Reaching Military Age Annually: 1,214,618 Active Frontline Personnel: 247,173 Active Reserve Personnel: 57,900
Land Systems	Tanks: 678 Armored Fighting Vehicles (AFVs): 2,850 Self-Propelled Guns (SPGs): 202 Towed-Artillery: 500 Multirole-Launch Rocket Systems (MLRs): 99
Air Power	Total Aircraft: 1,613 Fighters/Interceptors: 289 Fixed-Wing Attack Aircraft: 289 Transport Aircraft: 529 Trainer Aircraft: 432 Helicopters: 741 Attack Helicopters: 122
Naval Power	Total Naval Strength: 131 Aircraft Carriers: 2 Frigates: 0 Destroyers: 43 Corvettes: 0 Submarine: 16 Coastal Defense Craft: 6 Mine Warfare: 29
Resources	Oil Production: 133,000 bbl/day

⁹⁵ http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Japan diakses pada 18 April 2015.

(Petroleum)	Oil Consumption: 4,470,000 bbl/day Proven Oil Reserves: 44,120,000 bbl/day
Logistical	Labor Force: 65,620,000 Merchant Marine Strength: 684 Major Ports and Terminals: 10 Roadway Coverage: 1,210,251 Railway Coverage: 27, 182 Serviceable Airports: 175
Financial (in USD)	Defense Budget: \$41,600,000,000 External Debt: \$3,017,000,000,000 Reserves of Foreign Exchange and Gold: \$1,268,000,000,000 Purchasing Power Parity: \$4,729,000,000,000